

STATISTIK SEKTORAL

KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA TANGERANG

TAHUN 2022



Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dapat menyelesaikan Buku Publikasi Statistik Sektor Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2022.

Dalam Buku ini digambarkan beberapa indikator, antara lain banyaknya Garis Kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indikator ketidakmerataan pendapatan (Gini Ratio) serta rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan jumlah penerima bantuan sosial Kota Tangerang tahun 2022 juga akan ditampilkan pada Buku Publikasi ini.

Kami berharap Buku Publikasi ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang. Kepada pihak Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dan semua pihak yang telah mendukung terbitnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Tangerang, Oktober 2022

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tangerang**

Hj. Indri Astuti, SH, M.Si
NIP. 197301041997032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GRAFIK.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan Penulisan.....	8
1.3 Sumber Data.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
Bab 1. Pendahuluan.....	9
Bab 2. Landasan Teori.....	9
Bab 3. Hasil dan Pembahasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	9
Bab 4. Program Perlindungan Sosial.....	10
Bab 5. Penutup.....	10
Bab 6. Lampiran.....	10
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	11
2.2 Sejarah Singkat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	11
2.3 Dasar Hukum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	13
2.4 Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	14
2.5 Program Pemerintah Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	17
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA TANGERANG TAHUN 2022.....	20
3.1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 - 2022.....	20
3.2 Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin Hasil Pemadanan Tahun 2022.....	27
3.3 Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Kelompok Umur Tahun 2022.....	28
3.4 Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2022.....	29
BAB 4 PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL.....	39
4.1 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	39
4.2 Program Keluarga Harapan (PKH).....	42
4.3 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).....	48
4.4 Penerima Yang Mendapatkan Bantuan Satu Sampai Lebih Dari Satu Bantuan.....	51
BAB 4.....	67
KESIMPULAN.....	67
4.5 Kesimpulan.....	67
BAB 5 Lampiran.....	69
5.1 Garis Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Miskin.....	69
5.2 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin.....	72
5.3 Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan.....	75
5.4 Gambaran Umum Perekonomian dan Distribusi Pendapatan.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 DTKS Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan	20
Tabel 3.2 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin per Kelurahan.....	21
Tabel 3.3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin Hasil Pemadanan	27
Tabel 3.4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Kelompok umur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	28
Tabel 3.5 Data DTKS per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan	30
Tabel 4.1 Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	40
Tabel 4.2 Jumlah Penerima BPNT Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.....	41
Tabel 4.3 Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	43
Tabel 4.4 Penerima Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pemadanan	45
Tabel 4.5 Jumlah Penerima PKH Menurut Jenis Kelamin dan Berdasarkan Kelompok Umur	46
Tabel 4.6 Penerima Bantuan Iuran JKN	48
Tabel 4.7 Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN)	49
Tabel 4.8 Penerima BPNT Berdasarkan Pemadanan.....	52
Tabel 4.9 Penerima BPNT Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	53
Tabel 4.10 Penerima PKH Berdasarkan Pemadanan	54
Tabel 4.11 Penerima PKH	55
Tabel 4.12 Penerima PBI JKN Berdasarkan Pemadanan	56
Tabel 4.13 Penerima PBI JKN.....	57
Tabel 4.14 Penerima BPNT dan PKH Berdasarkan Pemadanan	59
Tabel 4.15 Penerima BPNT dan PKH.....	59
Tabel 4.16 Penerima BPNT dan PBI JKN Berdasarkan Pemadanan	61
Tabel 4.17 Penerima BPNT dan PBI JKN.....	62
Tabel 4.18 Penerima PKH dan PBI JKN	63
Tabel 4.19 Penerima PKH dan PBI JKN	64
Tabel 4.20 Penerima BPNT, PKH dan PBI JKN.....	65
Tabel 4.21 Penerima BPNT, PKH dan PBI JKN.....	66
Tabel 6.1 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Banten.....	70
Tabel 6.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang.....	72
Tabel 6,3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Banten 2019-2022.....	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia.....	7
Grafik 3.1 DTKS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 -2022	21
Grafik 3.2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022	25
Grafik 3.3 Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin.	26
Grafik 4.1 Jumlah Penerima BPNT.....	40
Grafik 4.2 Presentase Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	42
Grafik 4.3 Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	44
Grafik 4.4 Presentase Penerima Keluarga Harapan (PKH) Menurut Kecamatan	46
Grafik 4.5 Penerima PKH Menurut Jenis Kelamin	47
Grafik 4.6 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).....	49
Grafik 4.7 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).....	50
Grafik 4.8 Penerima BPNT Menurut Jenis Kelamin.....	54
Grafik 4.9 Penerima PKH Menurut Jenis Kelamin	56
Grafik 4.10 Penerima PBI JKN Menurut Jenis Kelamin	58
Grafik 4.11 Penerima BPNT dan PKH Menurut Jenis Kelamin	60
Grafik 4.12 Penerima BPNT dan PBI JKN Menurut Jenis Kelamin	62
Grafik 4.13 Penerima PKH dan PBI JKN Menurut Jenis Kelamin.....	64
Grafik 4.14 Penerima PKH dan PBI JKN Menurut Jenis Kelamin.....	66
Grafik 6.1 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Banten	69
Grafik 6,2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Banten	73
Grafik 6,3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2019 s/d 2022	74
Grafik 6,4 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kota Tangerang 2019-2022.....	76
Grafik 6,5 Gini Ratio Kab/Kota Provinsi Banten 2017-2022.....	79

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya setiap negara yang melakukan pembangunan akan menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu orientasi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu cita-cita mulia dalam deklarasi Milenium Development Goals (MDG's) hasil dari kesepakatan kepala Negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015 lalu diperkuat dengan disepakatinya dokumen "The Future We Want" dalam UN Conference on Sustainable Development 2012. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia, dengan target salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Masalah kemiskinan hingga saat ini menjadi salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2022 dapat di lihat dari gambar dibawah ini. Secara umum, pada

periode tersebut tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase.



Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia

Pada Maret 2022, Jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,38 Juta dari 27,54 Juta pada tahun 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, melalui berbagai program perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara memiliki tanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dengan cara mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, dan menyediakan fasilitas pelayanan yang layak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kesuksesan berbagai program perlindungan sosial tersebut perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat dan mutakhir, karena tantangan terbesar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial adalah

teridentifikasinya kelompok masyarakat sasaran yang menjadi penerima manfaat secara tepat sesuai dengan kriteria dari masing-masing program yang dicanangkan Pemerintah.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) dan digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan. Beberapa program bantuan sosial (bansos) reguler yang sudah menggunakan data DTKS pada tahun 2022 adalah antara lain Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berperan penting dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan. Data ini merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial, khususnya penerima manfaat bansos. Untuk mendukung upaya percepatan tersebut, data terpadu harus selalu termutakhirkan dengan baik dan valid agar perannya sebagai sumber data dapat diandalkan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penyusunan Buku Publikasi Statistik Sektor Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 ini adalah untuk menyediakan informasi dan memberikan gambaran mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah penerima bantuan sosial Kota Tangerang, serta lampiran data besarnya garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin,

kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta Indikator ketidakmerataan pendapatan (Gini Ratio).

Beberapa informasi yang disajikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum DTKS di Kota Tangerang tahun 2022.
2. Gambaran Umum Program Perlindungan Sosial di Kota Tangerang tahun 2022.
3. Lampiran data garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta Indikator ketidakmerataan pendapatan (Gini Ratio) di Kota Tangerang tahun 2022.

1.3 Sumber Data

Data Statistik Sektor Kemiskinan yang dianalisis bersumber dari Kementerian Sosial dan BPS Kota Tangerang

1.4 Sistematika Penulisan

Buku Publikasi Statistik Sektor Kemiskinan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 ini disusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab 2. Landasan Teori

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep, definisi, data dan formula dari indikator yang disusun dalam buku publikasi ini.

Bab 3. Hasil dan Pembahasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Bab ini berisi analisis deskriptif DTKS yang terdiri dari DTKS berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan, Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan.

Bab 4. Program Perlindungan Sosial

Bab ini berisi tentang program perlindungan sosial yang sudah menggunakan data DTKS diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Keluarga Harapan (PKH), dan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Bab 5. Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil Analisa deskriptif Buku Publikasi Statistik Sektoral Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2022 ini.

Bab 6. Lampiran

Bab ini berisi lampiran data statistik kemiskinan berupa jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, serta gambaran umum tentang ketidakmerataan pendapatan (Indeks Gini Ratio) tahun 2022.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pengertian DTKS tersebut termuat dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS sebagaimana dimaksud di atas merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Dalam Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS disebutkan penjelasan tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

2.2 Sejarah Singkat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data terpadu kemiskinan di Indonesia, yang saat ini disebut DTKS, telah mengalami proses transformasi yang cukup panjang. Kebutuhan terhadap data tersebut berawal dari pelaksanaan program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mengatasi krisis ekonomi 1998. Penargetan penerima manfaat untuk program yang pertama kali menysasar masyarakat miskin ini menggunakan data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai satu-satunya

data yang tersedia dan telah terklasifikasi berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga pada saat itu (Satriawan, Perdana, dan Prima, 2015). Data BKKBN tersebut selanjutnya diperbarui dan digunakan untuk memperluas serta meningkatkan ketepatan sasaran program OPK, yang kemudian menjadi program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

Pada 2005, Pemerintah Pusat mulai secara serius membangun basis data khusus kemiskinan. Kegiatan ini pertama kali diwujudkan melalui Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dihasilkan menjadi acuan penargetan penerima manfaat program Raskin, BLT 2005, dan uji coba PKH 2007. Berikutnya, pembaruan terhadap hasil PSE dilakukan pula oleh BPS pada 2008 dan 2011 melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Data hasil pengolahan PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada TNP2K dan menjadi Basis Data Terpadu (BDT) untuk menentukan sasaran penerima manfaat berbagai program perlindungan sosial pada periode 2012–2014. Meski pembaruan data terpadu kemiskinan saat itu dijadwalkan setiap tiga tahun sekali, pembaruan terhadap BDT hasil PPLS 2011 baru dilaksanakan pada 2015. Kegiatan ini kembali dilakukan oleh BPS melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Namun, hasil pengolahan datanya tidak lagi diserahkan kepada TNP2K, melainkan kepada Kemensos sebagaimana amanat UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selanjutnya, pengelolaan BDT sepenuhnya berada di bawah Pusdatin Kesos Kemensos sejak 2016. Pada tahun yang sama, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemutakhiran atau verval data tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini BPS. Kegiatan ini dilimpahkan dan menjadi tanggung

jawab pemerintah kabupaten/kota yang kemudian biasa disebut dengan pemutakhiran mandiri.

Pada 2017, Berdasarkan Permensos No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, BDT berubah nomenklatur menjadi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM dan OTM) dan pada tahun 2019 Berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial hingga saat ini.

2.3 Dasar Hukum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Regulasi yang menjadi dasar hukum dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan DTKS telah tertuang baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Sosial, diantaranya:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pada bagian kedua, terkait pendataan fakir miskin, Pasal 8 mengatur mengenai penetapan kriteria fakir miskin oleh Menteri yang berwenang berkoordinasi dengan K/L terkait, dan mengatur verifikasi dan validasi hasil pendataan oleh Menteri dan Bupati/Walikota. Pada Pasal 9 mengatur mengenai pendaftaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tergolong fakir miskin namun belum terdata, dan kewajiban untuk melaporkan setiap perubahan data yang ada secara berjenjang mulai dari Lurah/Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada Menteri. Pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. Lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (3) disebutkan

bahwa Data Terpadu tersebut dapat dipergunakan oleh K/L terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara khusus terkait pembagian Urusan Pemerintah di bidang sosial sub bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial disebutkan bahwa pengelolaan data fakir miskin nasional menjadi wewenang Pemerintah Pusat, untuk pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, dan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota menjadi wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut pada Pasal 282 disebutkan jika penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD, dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial beserta perubahannya melalui Permensos Nomor 11 Tahun 2019

2.4 Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pengelolaan

Data merupakan kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, keandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya. Oleh karena itu, dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 diatur bahwa pengelolaan DTKS dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

1) Pendataan

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung. Pendataan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pendataan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri. Hasil pendataan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

2) Verifikasi dan Validasi

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan validasi data

adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

3) Penetapan Hasil pendataan

verifikasi dan validasi disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi: Hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya, dan Hasil pendataan, verifikasi, dan validasi. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ditetapkan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan merupakan dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri dapat memperbaiki atau melengkapi data baik data yang berasal dari hasil pendataan, verifikasi, dan validasi maupun dari hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya.

4) Penggunaan

Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Data terpadu kesejahteraan sosial dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang digunakan oleh

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Masyarakat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri secara tertulis. Menteri dapat menolak permohonan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial yang diajukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial hanya dapat digunakan sampai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang baru ditetapkan.

Setelah Pemutakhiran BDT hasil pendataan BPS pada tahun 2015, Kemensos telah melakukan penetapan data terpadu baik DT-PFM OTM (sebelum berubah nomenklatur menjadi DTKS) maupun DTKS. Penetapan DTKS terakhir melalui Kepmensos No. 12/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 Tahap Pertama yang menetapkan 138.425.347 data, terdiri dari penetapan sebelumnya yaitu Kepmensos No.146/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 Tahap Kedua serta data perbaikan dan usulan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2021 termasuk data yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota, bank penyalur bantuan sosial atau pos penyalur bantuan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.

2.5 Program Pemerintah Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya. Berikut adalah beberapa program yang berbasis DTKS:

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

2) Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

3) Program Iuran Jaminan Kesehatan

Program Bansos PBI JK adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia di sektor kesehatan. Mereka yang terdaftar Bansos PBI JK akan mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan.

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA TANGERANG TAHUN 2022

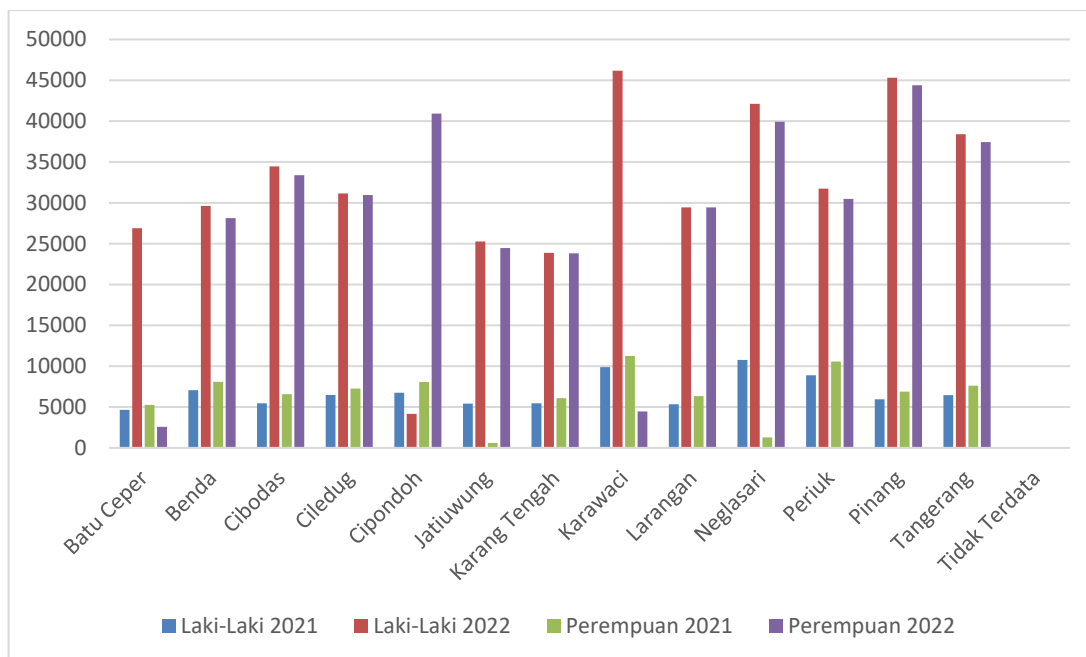
3.1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 - 2022

Data terpadu kesejahteraan sosial menurut jenis kelamin per Kecamatan pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 DTKS Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

KECAMATAN	2021		2022	
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
Batu Ceper	4.661	5.258	26.904	25.690
Benda	7.063	8.079	29.627	28.123
Cibodas	5.461	6.571	34.468	33.388
Ciledug	6.481	7.256	31.157	30.955
Cipondoh	6.753	8.071	41.650	40.918
Jatiuwung	5.421	6.030	25.272	24.457
Karang Tengah	5.455	6.084	23.884	23.815
Karawaci	9.891	11.269	46.171	44.530
Larangan	5.333	6.337	29.437	29.443
Neglasari	10.778	12.920	42.113	39.918
Periuk	8.881	10.581	31.743	30.474
Pinang	5.941	6.897	45.308	44.393
Tangerang	6.468	7.607	38.401	37.439
Tidak Terdata	0	0	50	53
TOTAL	88.587	102.960	446.185	433.596

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022)



Grafik 3.1 DTKS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 -2022

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tangerang tahun 2022 sebesar 879.791 Jiwa mengalami peningkatan sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 191.547, sehingga dapat terlihat upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan data DTKS menjadi big data meningkatkan data warga miskin dan lebih banyak, yakni 60% sejalan dengan dampak pandemi yang meningkatkan jumlah orang miskin.

Tabel 3.2 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin per Kelurahan

KECAMATAN/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
KEC. BATUCEPER	26.904	25.690	52.594
Batuceper	3.456	3.370	6.826
Batujaya	2.971	2.767	5.738
Batusari	5.148	4.878	10.026
Kebon Besar	4.448	4.180	8.628
Poris Gaga	4.672	4.456	9.128
Poris Gaga Baru	3.217	3.163	6.380
Poris Jaya	2.963	2.847	5.810
Tidak Terdata	29	29	58

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
-----------	-----------	-----------	-------

KEC. BENDA	29.627	28.123	57.750
Belendung	8.037	7.529	15.566
Benda	4.890	4.660	9.550
Jurumudi	6.817	6.436	13.253
Jurumudi Baru	7.002	6.763	13.765
Pajang	2.855	2.697	5.552
Tidak Terdata	26	38	64
KEC. CIBODAS	34.468	33.388	67.856
Cibodas	8.906	8.564	17.470
Cibodas Baru	2.122	2.113	4.235
Cibodasari	5.857	5.930	11.787
Jatiuwung	5.192	4.837	10.029
Panungangan Barat	5.676	5.353	11.029
Uwung Jaya	6.693	6.554	13.247
Tidak Terdata	22	37	59
KEC. CILEDUG	31.157	30.955	62.112
Paninggilan	4.380	4.361	8.741
Paninggilan Utara	4.358	4.424	8.782
Parung Serab	3.626	3.509	7.135
Sudimara Barat	3.669	3.658	7.327
Sudimara Jaya	4.961	4.801	9.762
Sudimara Selatan	4.007	3.946	7.953
Sudimara Timur	2.747	2.801	5.548
Tajur	3.376	3.420	6.796
Tidak Terdata	33	35	68
KEC. CIPONDOH	41.650	40.918	82.568
Cipondoh	4.722	4.840	9.562
Cipondoh Indah	2.578	2.607	5.185
Cipondoh Makmur	4.634	4.595	9.229
Gondrong	5.066	4.915	9.981
Kenanga	4.378	4.196	8.574
Ketapang	3.946	3.879	7.825
Petir	4.032	3.859	7.891
Poris Plawad	3.346	3.268	6.614
Poris Plawad Indah	4.324	4.227	8.551
Poris Plawad Utara	4.582	4.473	9.055
Tidak Terdata	42	59	101

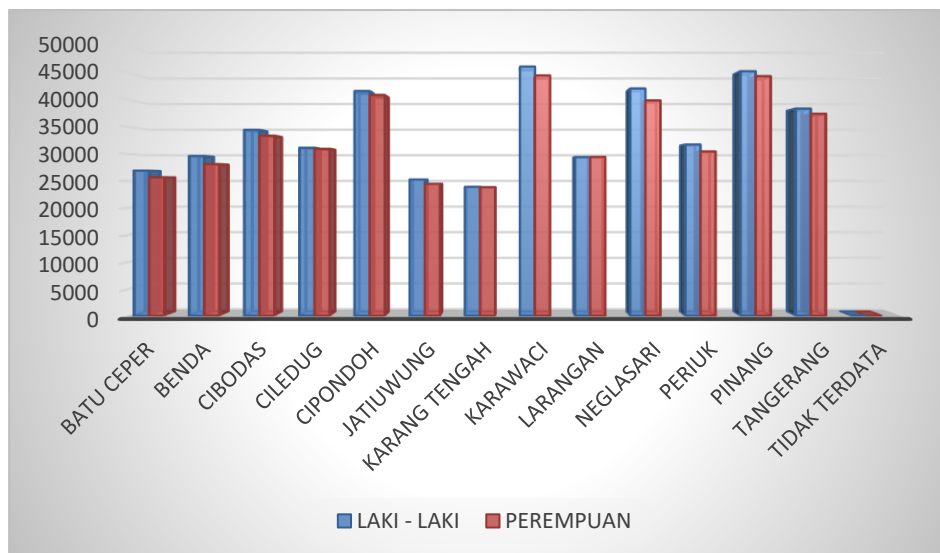
KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
KEC. JATI UWUNG	25.272	24.457	49.729
Alam Jaya	3.943	3.829	7.772
Gandasari	5.803	5.616	11.419
Jatake	3.254	3.144	6.398
Keroncong	3.875	3.848	7.723
Manis Jaya	4.227	4.011	8.238
Pasir Jaya	4.152	3.976	8.128
Tidak Terdata	18	33	51
KEC. KARANG TENGAH	23.884	23.815	47.699
Karang Mulya	2.735	2.748	5.483
Karang Tengah	5.179	5.281	10.460
Karang Timur	4.250	4.238	8.488
Padurenan	4.582	4.516	9.098
Parung Jaya	1.910	1.804	3.714
Pondok Bahar	2.739	2.787	5.526
Pondok Pucung	2.466	2.414	4.880
Tidak Terdata	23	27	50
KEC. KARAWACI	46.171	44.530	90.701
Bojong Jaya	2.849	2.631	5.480
Bugel	3.763	3.504	7.267
Cimone	4.559	4.421	8.980
Cimone Jaya	4.385	4.230	8.615
Gerendeng	3.155	3.095	6.250
Karawaci	2.470	2.345	4.815
Karawaci Baru	2.720	2.819	5.539
Koang Jaya	2.840	2.717	5.557
Margasari	4.220	4.019	8.239
Nambo Jaya	2.058	2.005	4.063
Nusa Jaya	3.220	3.149	6.369
Pabuaran	2.713	2.623	5.336
Pabuaran Tumpeng	2.728	2.614	5.342
Pasar Baru	1.126	1.139	2.265
Sukajadi	1.845	1.714	3.559
Sumur Pacing	1.457	1.448	2.905
Tidak Terdata	63	57	120

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
-----------	-----------	-----------	-------

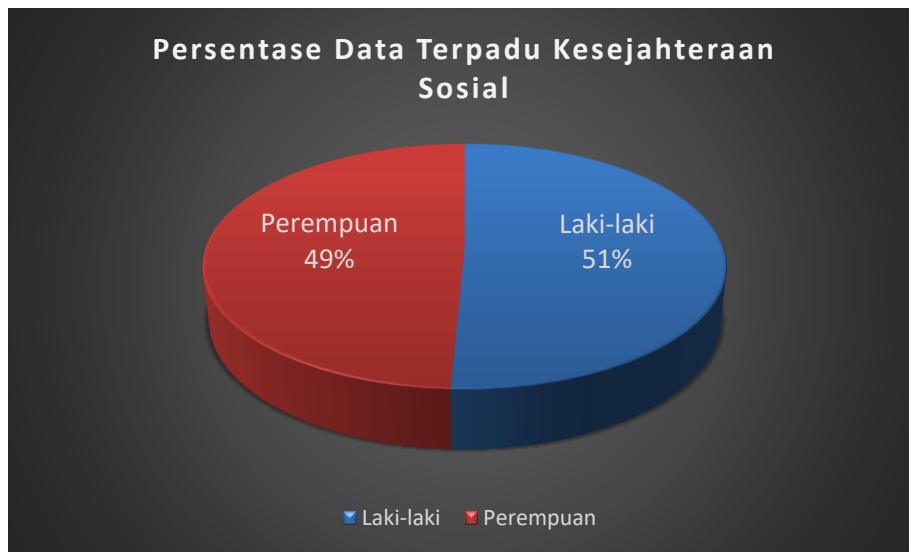
KEC. LARANGAN	29.437	29.443	58.880
Cipadu	5.240	5.304	10.544
Cipadu Jaya	3.214	3.207	6.421
Gaga	3.610	3.688	7.298
Kreo	3.131	3.016	6.147
Kreo Selatan	4.172	4.166	8.338
Larangan Indah	2.425	2.478	4.903
Larangan Selatan	3.466	3.407	6.873
Larangan Utara	4.160	4.147	8.307
Tidak Terdata	19	30	49
KEC. NEGLASARI	42.113	39.918	82.031
Karang Anyar	4.677	4.417	9.094
Karang Sari	8.251	7.926	16.177
Kedaung Baru	4.314	4.132	8.446
Kedaung Wetan	6.930	6.357	13.287
Mekarsari	4.446	4.309	8.755
Neglasari	7.410	7.004	14.414
Selapajang Jaya	6.057	5.739	11.796
Tidak Terdata	28	34	62
KEC. PERIUK	31.743	30.474	62.217
Gebang Raya	6.946	6.803	13.749
Gembor	6.472	6.200	12.672
Periuk	6.016	5.855	11.871
Periuk Jaya	5.215	4.940	10.155
Sangiang Jaya	7.039	6.614	13.653
Tidak Terdata	55	62	117
KEC. PINANG	44.308	44.393	89.701
Cipete	4.636	4.539	9.175
Kunciran	3.525	3.508	7.033
Kunciran Indah	5.960	5.708	11.668
Kunciran Jaya	3.195	3.106	6.301
Nerogtog	5.542	5.428	10.970
Pakojan	2.911	2.921	5.832
Panunggangan	2.840	2.766	5.606
Panunggangan Timur	1.259	1.196	2.455
Panunggangan Utara	6.050	5.842	11.892
Pinang	4.772	4.749	9.521
Sudimara Pinang	4.568	4.581	9.149
Tidak Terdata	50	49	99

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
TANGERANG	38.401	37.439	75.840
Babakan	4.651	4.552	9.203
Buaran Indah	7.442	7.199	14.641
Cikokol	8.620	8.303	16.923
Kelapa Indah	2.169	2.096	4.265
Sukaasih	1.186	1.103	2.289
Sukarasa	1.620	1.672	3.292
Sukasari	4.235	4.273	8.508
Tanah Tinggi	8.443	8.196	16.639
Tidak Terdata	35	45	80
KEC. TIDAK TERDATA	50	53	103
Tidak Terdata	50	53	103

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 3.2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022



Grafik 3.3 Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Total penduduk Kota Tangerang yang masuk ke dalam DTKS Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 879.781 Jiwa, yang terbagi atas jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 446.185 Jiwa dan Perempuan sebanyak 433.596 Jiwa, dengan masing-masing Persentase laki-laki sebanyak 51% dan perempuan sebanyak 49%.

Pada tabel 3.2 Kota Tangerang terbagi atas 13 Kecamatan yang terdaftar pada DTKS, Kecamatan Karawaci merupakan yang tertinggi terdaftar pada DTKS tahun 2022 sebanyak 90.701 Jiwa terdiri dari jenis kelamin Laki - Laki 46.171 Jiwa dan Perempuan sebanyak 44.530 Jiwa sementara Kecamatan terendah yang terdaftar pada DTKS tahun 2022 yaitu Kecamatan Karang Tengah sebanyak 47.699 Jiwa terdiri dari jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 23.884 Jiwa dan perempuan sebanyak 23.815 Jiwa.

3.2 Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin Hasil Pemadanan Tahun 2022

Dalam upaya mengatasi permasalahan DTKS dan Data Penerima bantuan sosial (Bansos) masih banyak masyarakat yang masuk dalam DTKS dan Penerima Bansos Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya tidak padan dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, bahkan masih ada yang belum melakukan perekaman e-KTP. Maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang melakukan Kerjasama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk memadankan DTKS yang bertujuan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tabel 3.3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin Hasil Pemadanan

KECAMATAN	PADAN	TIDAK PADAN	TOTAL
Batucapeer	51.857	737	52.594
Benda	56.366	1.384	57.750
Cibodas	66.458	1.398	67.856
Ciledug	60.951	1.161	62.112
Cipondoh	81.136	1.432	82.568
Jatiuwung	48.875	854	49.729
Karang Tengah	46.793	906	47.699
Karawaci	88.965	1.736	90.701
Larangan	58.009	871	58.880
Neglasari	79.297	2.734	82.031
Periuk	60.731	1.486	62.217
Pinang	87.689	2.012	89.701
Tangerang	74.325	1.515	75.840
Tidak Terdata	101	2	103
TOTAL	861.553	18.228	879.781

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Dari upaya pemadanan antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dapat terlihat pada tabel 3.3. data yang sudah padan sebesar 861.553 jiwa dan belum padan sebesar 18.228 jiwa. Terlihat DTKS Kota Tangerang tingkat pemadannya sudah sangat baik sudah padan dengan data dari Dit.Jen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

3.3 Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Data terpadu kesejahteraan sosial menurut kelompok umur pada tahun 2022 ini merupakan penduduk Kota Tangerang yang namanya terdaftar dalam data DTKS dengan melihat status kelompok umur.

Tabel 3.4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Kelompok umur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0-4 Tahun	26.908	24.938	51.846
5-9 Tahun	37.088	34.091	71.179
10-14 Tahun	39.947	37.119	77.066
15-19 Tahun	38.041	36.314	74.355
20-24 Tahun	38.972	37.035	76.007
25-29 Tahun	38.911	36.255	75.166
30-34 Tahun	36.442	33.063	69.505
35-39 Tahun	37.300	36.526	73.826
40-44 Tahun	37.083	38.276	75.359
45-49 Tahun	33.690	35.217	68.907
50-54 Tahun	28.414	28.591	57.005
55-59 Tahun	20.589	21.869	42.458
60-64 Tahun	15.081	15.897	30.978
65-69 Tahun	9.604	8.853	18.457
70-74 tahun	4.615	4.588	9.203
>75 Tahun	3.500	4.964	8.464
TOTAL	446.185	433.596	879.781

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Pada tabel 3.4 Data terpadu kesejahteraan sosial menurut kelompok umur yang terbesar pada kelompok umur 10 -14 tahun sebesar 77.066 Jiwa

terdiri dari laki-laki 39.947 jiwa dan perempuan 37.119 jiwa dan 20-24 tahun sebesar 76.007 jiwa terdiri dari laki-laki 38.972 jiwa dan perempuan 37.035 jiwa selain itu juga terdapat kelompok umur terendah pada >75 tahun sebesar 8.464 terdiri dari laki-laki 3.500 jiwa dan perempuan 4.964 jiwa.

Jika dilihat dari tabel di atas rata-rata pada umur produktif yang terdata pada data terpadu kesejahteraan sosial cukup tinggi dibandingkan dengan usia lansia. Sebagai dampak pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 mengakibatkan banyak PHK yang terjadi di perusahaan.

3.4 Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2022

Data terpadu kesejahteraan sosial menurut pekerjaan pada tahun 2022 ini merupakan penduduk Kota Tangerang yang namanya terdaftar dalam data DTKS dengan melihat status pekerjaannya, dimana status pekerjaan terdiri dari 73 jenis pekerjaan, diantaranya Akuntan, Anggota DPRD Kab, Arsitek, Biarawan, Bidan, Buruh Harian Lepas, Buruh Nelayan/Perikanan, Dokter, Guru, Imam Masjid, Industri, Juru Masak, Karyawan BUMD, Karyawan BUMN, Karyawan Honorer, Karyawan Swasta, Kepala Desa, Kepolisian RI (Polri), Kontruksi, Konsultan, Mekanik, Mengurus Rumah Tangga, Nelayan/Perikanan, Notaris, Paraji, Paranormal, Pastor, Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Pelajar/Mahasiswa, Pelaut, Pembantu Rumah Tangga, Penata Busana, Penata Rambut, Penata Rias, Pendeta, Peneliti, Pengacara, Pensiunan, Penterjemah, Penyiar Radio, Perangkat Desa, Perawat, Perdagangan, Petani/Pekebun, Pertenakan, Pialang, Pilot, Presiden, Psikiater, Seniman, Sopir, Tabib, Tentara, Transportasi, Tukang Batu, Tukang Cukur, Tukang Gigi, Tukang Jahit, Tukang Kayu, Tukang Las/Pandai Besi,

Tukang Listrik, Tukang Sol Sepatu, Ustadz/Mubaligh, Wartawan, Wiraswasta, Pekerjaan Lainnya, Belum/Tidak Bekerja, Tidak ada data.

Tabel 3.5 Data DTKS per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Akuntan	Anggota DPRD Kab	Apoteker	Arsitek	Biarawati	Bidan
Batu Ceper	1	0	1	0	0	19
Benda	0	0	0	0	0	6
Cibodas	0	1	0	0	0	17
Ciledug	1	0	1	0	0	11
Cipondoh	0	0	6	0	0	28
Jatiuwung	0	0	3	0	0	17
Karang Tengah	1	0	0	0	0	9
Karawaci	0	0	3	0	0	24
Larangan	0	0	1	1	0	7
Neglasari	0	1	0	1	1	12
Periuk	0	0	0	0	1	13
Pinang	0	0	6	1	0	27
Tangerang	0	2	2	0	0	20
Tidak Terdata	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	4	23	3	2	210

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data DTKS Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Buruh Harian Lepas	Buruh Nelayan/Perikanan	Buruh Peternakan	Buruh Tani/Perkebunan	Dokter
Batu Ceper	1.706	1	1	10	0
Benda	3.585	1	0	48	1
Cibodas	1.193	3	0	20	3
Ciledug	2.030	0	0	24	7
Cipondoh	3.233	1	1	79	6
Jatiuwung	515	0	0	13	0
Karang Tengah	1.335	0	2	106	4
Karawaci	3.428	1	1	34	5

Larangan	1.481	1	1	9	2
Neglasari	7.265	1	8	76	3
Periuk	1.120	0	0	27	1
Pinang	3.407	0	2	145	8
Tangerang	4.365	2	0	16	5
Tidak Terdata	8	0	0	1	0
TOTAL	34.671	11	16	608	45

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data DTKS per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Dosen	Guru	Imam Masjid	Industri	Juru Masak	Karyawan BUMD
Batu Ceper	5	537	0	9	0	5
Benda	6	529	0	6	0	3
Cibodas	6	546	0	2	1	12
Ciledug	10	671	0	1	1	2
Cipondoh	15	1.084	0	9	0	8
Jatiuwung	3	367	0	1	0	2
Karang Tengah	11	566	1	1	0	3
Karawaci	17	705	2	4	0	15
Larangan	9	432	3	3	1	3
Neglasari	4	300	0	9	0	5
Periuk	6	543	2	3	0	2
Pinang	19	743	1	7	0	14
Tangerang	10	554	1	1	1	12
Tidak Terdata	0	0	0	0	0	0
TOTAL	121	7.577	10	56	4	86

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data DTKS per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Karyawan BUMN	Karyawan Honorer	Karyawan Swasta	Kepala Desa	Kepolisian RI
Batu Ceper	25	48	13.785	0	13
Benda	25	25	13.578	0	2
Cibodas	57	60	19.742	0	13
Ciledug	62	74	14.686	0	17

Cipondoh	57	93	16.187	0	24
Jatiuwung	9	24	16.609	0	4
Karang Tengah	55	73	10.579	0	15
Karawaci	57	124	21.830	0	17
Larangan	52	45	14.118	0	18
Neglasari	56	74	16.680	0	7
Periuk	36	51	17.591	0	16
Pinang	78	135	19.544	0	22
Tangerang	58	107	14.761	1	16
Tidak Terdata	0	0	23	0	0
TOTAL	627	933	209.713	1	184

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Kontruksi	Konsultan	Mekanik	Mengurus Rumah Tangga	Nelayan/Perikanan
Batu Ceper	0	0	4	11.293	1
Benda	0	0	5	13.014	0
Cibodas	2	0	7	13.137	0
Ciledug	3	2	10	13.742	0
Cipondoh	1	1	12	18.327	2
Jatiuwung	0	0	1	9.340	1
Karang Tengah	4	1	10	10.666	0
Karawaci	2	2	10	18.881	2
Larangan	1	0	8	13.355	2
Neglasari	1	0	11	19.538	1
Periuk	4	0	1	12.675	3
Pinang	3	5	6	20.396	1
Tangerang	1	1	2	16.842	1
Tidak Terdata	0	0	0	16	0
TOTAL	22	12	87	191.222	14

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Notaris	Paraji	Paranormal	Pastor	Pedagang
Batu Ceper	0	0	0	0	70
Benda	0	0	0	0	50
Cibodas	1	1	1	0	225
Ciledug	0	0	0	0	264
Cipondoh	0	1	0	0	299
Jatiuwung	0	0	0	0	57
Karang Tengah	1	0	0	0	163
Karawaci	0	1	0	0	199
Larangan	0	0	0	0	137
Neglasari	0	0	1	1	224
Periuk	0	0	0	0	86
Pinang	0	0	0	0	309
Tangerang	0	1	0	0	443
Tidak Terdata	0	0	0	0	0
TOTAL	2	2	2	1	2.526

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Pegawai Negeri Sipil	Pelajar/ Mahasiswa	Pelaut	Pembantu Rumah Tangga	Penata Busana
Batu Ceper	84	12.298	3	2	0
Benda	95	14.183	2	5	0
Cibodas	135	15.416	4	13	0
Ciledug	233	15.688	4	15	0
Cipondoh	198	19.627	7	10	0
Jatiuwung	36	10.760	2	0	0
Karang Tengah	212	11.864	3	19	0

Karawaci	169	21.714	6	12	0
Larangan	159	15.111	1	18	1
Neglasari	85	18.557	0	12	0
Periuk	119	15.776	4	5	0
Pinang	244	20.699	2	17	0
Tangerang	253	17.917	0	10	0
Tidak Terdata	1	19	0	0	0
TOTAL	2.023	209.629	40	138	1

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Penata Rambut	Penata Rias	Pendeta	Peneliti	Pengacara	Pensiunan
Batu Ceper	0	0	2	1	0	55
Benda	1	0	2	1	3	29
Cibodas	0	1	4	1	2	245
Ciledug	0	2	3	0	0	272
Cipondoh	0	2	5	0	2	109
Jatiuwung	0	2	0	0	0	34
Karang Tengah	0	0	0	0	0	213
Karawaci	1	0	12	0	3	192
Larangan	2	0	2	0	1	313
Neglasari	0	1	5	1	1	75
Periuk	0	1	7	0	2	123
Pinang	0	0	1	2	3	247
Tangerang	0	0	11	1	2	174
Tidak Terdata	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	9	54	7	19	2.081

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Penterjemah	Penyiar Radio	Perangkat Desa	Perawat	Perdagangan	Petani/Pekebun
-----------	-------------	---------------	----------------	---------	-------------	----------------

Batu Ceper	0	0	2	19	24	13
Benda	0	0	1	8	26	29
Cibodas	0	0	9	39	76	37
Ciledug	0	0	5	20	38	24
Cipondoh	0	0	2	40	61	83
Jatiuwung	0	0	5	14	39	47
Karang Tengah	0	1	7	23	89	148
Karawaci	0	0	1	18	91	60
Larangan	0	0	7	11	51	13
Neglasari	1	0	5	9	63	63
Periuk	0	0	1	13	21	29
Pinang	0	0	2	34	61	74
Tangerang	0	0	1	31	43	31
Tidak Terdata	0	0	0	0	0	1
TOTAL	1	1	48	279	683	652

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/202

Lanjutan Tabel 3.5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Peternak	Pialang	Pilot	Presiden	Psikiater	Seniman
Batu Ceper	0	0	0	0	0	1
Benda	0	0	1	0	0	1
Cibodas	0	0	0	0	0	11
Ciledug	0	0	0	0	0	10
Cipondoh	2	0	1	0	0	9
Jatiuwung	0	1	0	0	0	0
Karang Tengah	0	1	1	0	0	9
Karawaci	0	0	1	0	0	11
Larangan	0	1	0	0	0	9
Neglasari	2	0	0	0	0	2
Periuk	0	0	0	0	0	3
Pinang	0	0	0	0	0	6
Tangerang	0	0	1	0	1	3
Tidak Terdata	0	0	0	0	0	0

TOTAL	4	3	5	0	1	652
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Sopir	Tabib	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Transportasi	Tukang Batu
Batu Ceper	213	0	9	3	4
Benda	194	0	6	7	2
Cibodas	189	0	6	7	7
Ciledug	145	0	9	8	9
Cipondoh	146	2	16	9	8
Jatiuwung	20	0	86	5	3
Karang Tengah	97	1	8	24	7
Karawaci	144	0	12	11	4
Larangan	121	0	4	21	6
Neglasari	140	1	9	9	6
Periuk	81	0	14	4	1
Pinang	150	0	8	9	3
Tangerang	153	0	9	4	2
Tidak Terdata	0	0	0	0	0
TOTAL	1.793	4	196	121	62

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Tukang Cukur	Tukang Gigi	Tukang Jahit	Tukang Kayu	Tukang Las	Tukang Listrk
Batu Ceper	0	0	5	0	0	1
Benda	0	0	4	4	1	0
Cibodas	0	0	8	1	2	0
Ciledug	1	0	10	0	2	1
Cipondoh	1	0	35	2	3	2
Jatiuwung	0	0	3	1	0	0
Karang Tengah	1	0	14	5	0	1

Karawaci	0	1	6	1	2	1
Larangan	2	1	46	1	2	3
Neglasari	0	0	9	3	3	2
Periuk	0	0	3	0	1	0
Pinang	0	0	13	2	1	1
Tangerang	0	0	4	2	0	0
Tidak Terdata	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	2	160	22	17	12

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.6 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Tukang Sol Sepatu	Ustadz/Mubaligh	Wartawan	Wiraswasta
Batu Ceper	0	2	5	2.842
Benda	0	2	4	2.218
Cibodas	1	11	12	5.052
Ciledug	0	6	23	5.105
Cipondoh	0	3	20	7.839
Jatiuwung	0	7	4	2.139
Karang Tengah	1	6	8	4.412
Karawaci	0	8	11	6.406
Larangan	1	9	12	6.050
Neglasari	0	1	5	3.057
Periuk	0	8	11	4.188
Pinang	0	8	20	8.308
Tangerang	0	4	16	6.261
Tidak Terdata	0	0	0	14
TOTAL	3	75	151	63.891

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Lanjutan Tabel 3.5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	Pekerja Lainnya	Belum/Tidak Bekerja	Belum Di Tentukan	Total
Batu Ceper	0	9.427	45	52.594
Benda	4	9.952	81	57.750

Cibodas	4	11.447	67	67.856
Ciledug	1	8.799	60	62.112
Cipondoh	8	14.743	100	82.568
Jatiuwung	6	9.482	67	49.729
Karang Tengah	3	6.879	37	47.699
Karawaci	5	16.346	89	90.701
Larangan	1	7.167	41	58.880
Neglasari	4	15.486	134	82.031
Periuk	4	9.543	74	62.217
Pinang	6	14.750	151	89.701
Tangerang	2	13.621	56	75.840
Tidak Terdata	1	19	0	103
TOTAL	49	1476.61	1002	87.9781

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa DTKS menurut pekerjaan tahun 2022 terdiri dari 73 jenis pekerjaan tersebut dapat diketahui dari data DTKS bahwa Karyawan Swasta dan Ibu Rumah Tangga merupakan status pekerjaan tertinggi yang terdaftar pada data DTKS Kota Tangerang tahun 2022 sebesar 209.713 jiwa dan 209.629 jiwa.

Namun pada tabel diatas menunjukkan terdapat jenis pekerjaan Anggota DPRD Kab, Arsitek, Dokter, Karyawan BUMD, Karyawan BUMN, Kepala Desa, Kepolisian RI, Notaris, PNS dan TNI yang terdaftar kedalam data DTKS tahun 2022. Sehingga memerlukan proses pendataan, verifikasi hingga verifikasi lebih baik lagi sehingga dapat tepat sasaran.

BAB 4

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

4.1 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

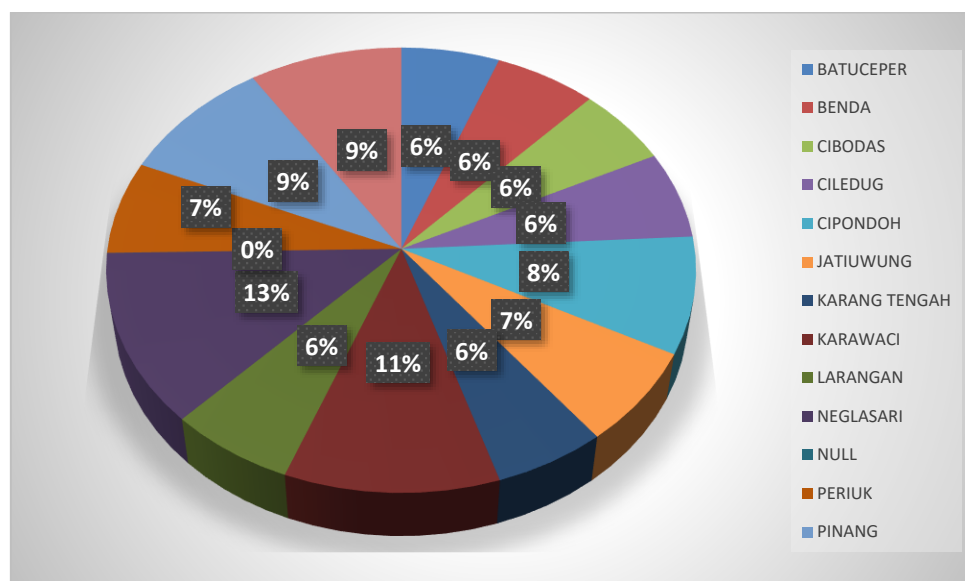
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

Tabel 4.1 Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

KECAMATAN	Penerima BNPT	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	3.246	3.243	3
Benda	3.369	3.363	6
Cibodas	3.140	3.136	4
Ciledug	3.480	3.479	1
Cipondoh	4.641	4.639	2
Jatiuwung	3.765	3.763	2
Karang Tengah	3.103	3.102	1
Karawaci	5.939	5.936	3
Larangan	3.487	3.486	1
Neglasari	6.845	6.834	11
Periuk	3.711	3.709	2
Pinang	5.122	5.120	3
Tangerang	5.053	5.050	3
Tidak Terdata	6	6	0
TOTAL	54.907	54.866	41

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.1 Jumlah Penerima BPNT

Total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 879.781 jiwa, terdapat 54.907 jiwa yang berhak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penerima bantuan pangan non tunai terbanyak pada Kecamatan Neglasari sebesar 6.845 jiwa sedangkan yang terkecil pada Kecamatan Periuk sebesar 3.103 jiwa dan yang tidak terdata sebesar 6 jiwa. Selain itu dari tingkat pemadannya sudah hampir 100 % yaitu sebesar 54.866 jiwa sedangkan yang belum padan yaitu 41 jiwa.

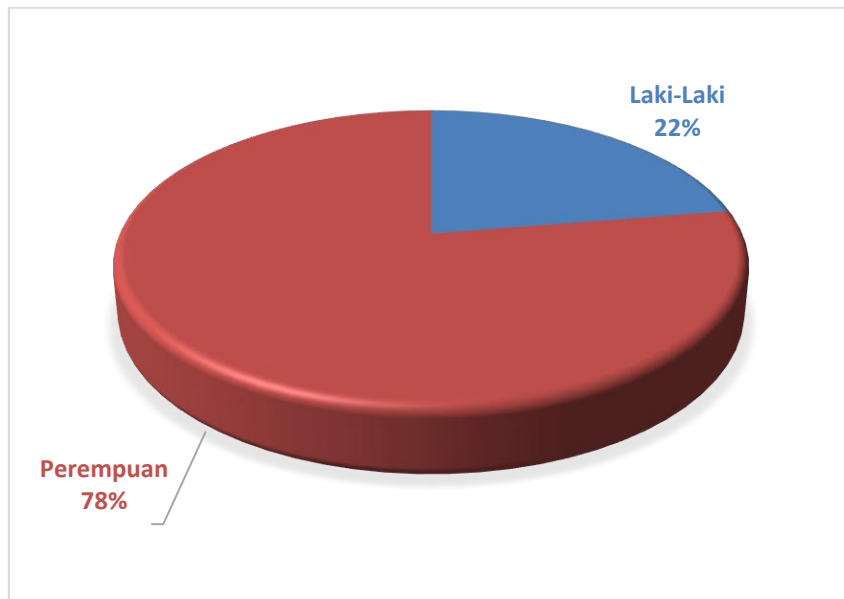
Tabel 4.2 Jumlah Penerima BPNT Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	0	0
5-9 Tahun	0	0
10-14 Tahun	0	0
15-19 Tahun	50	49
20-24 Tahun	170	357
25-29 Tahun	736	1.240
30-34 Tahun	1.022	2.152
35-39 Tahun	837	4.046
40-44 Tahun	367	5.952
45-49 Tahun	302	6.613
50-54 Tahun	315	5.414
55-59 Tahun	296	4.054
60-64 Tahun	3.637	5.575
65-69 Tahun	2.610	3.574
70-74 tahun	1.176	1.845
>75 Tahun	803	1.715
TOTAL	12.321	42.586

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Pada tabel 4.2 sebagai kelompok rentan seperti lansia merupakan penerima terbesar pada range usia 60-64 tahun sebesar 9.212 jiwa sebagai penerima BPNT. Mensos mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

"Ada jutaan lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan dan atau tanpa keluarga. Mereka mengalami berbagai masalah dan untuk itu membutuhkan penanganan lebih intensif.



Grafik 4.2 Presentase Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut jenis kelamin perempuan mendominasi sebesar 78% sedangkan Laki-Laki hanya sebesar 22 %.

Menandakan bahwa banyaknya penduduk perempuan yang menjadi kepala keluarga dalam DTKS sebagai keluarga penerima manfaat (KPM untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

4.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan

sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

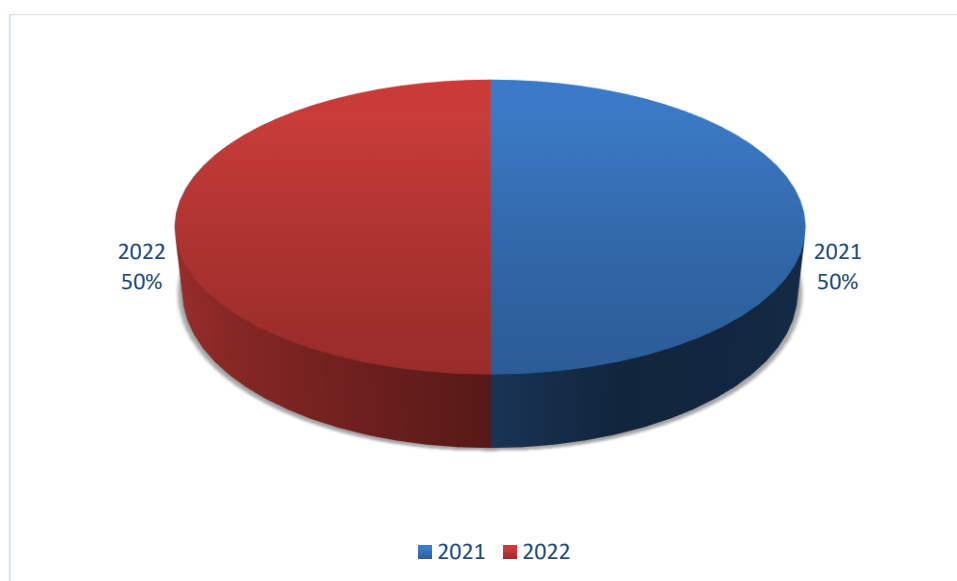
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Tabel 4.3 Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

KECAMATAN	PKH 2021	PKH 2022
Batu Ceper	1.886	2.054
Benda	2.528	2.320
Cibodas	1.935	2.419
Ciledug	1.340	2.200

Cipondoh	2.693	2.866
Jatiuwung	2.194	1.837
Karang Tengah	1.527	1.471
Karawaci	3.291	3.404
Larangan	1.357	1.381
Neglasari	5.325	4.248
Periuk	2.424	2.014
Pinang	3.681	3.051
Tangerang	2.287	2.331
Tidak Terdata	0	1
TOTAL	32.468	31.597

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.3 Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

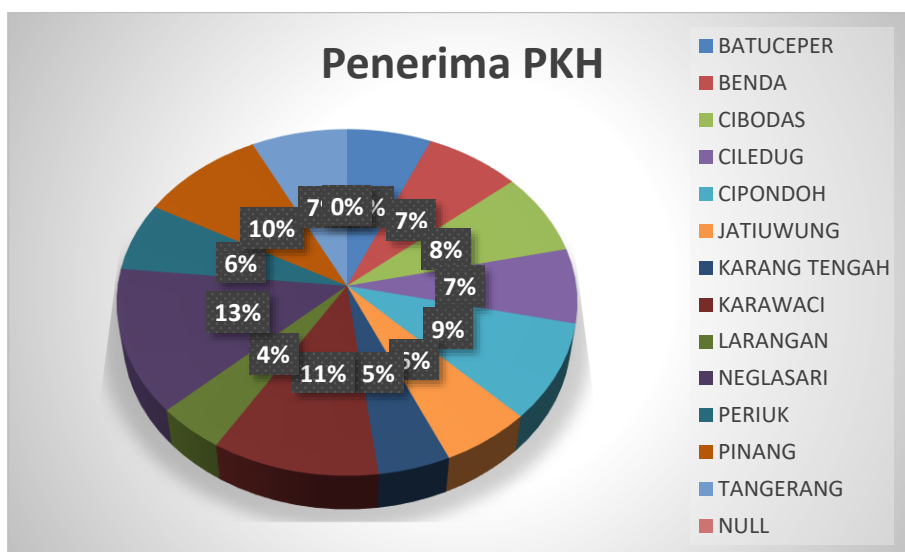
Pelaksanaan PKH cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan, seiring meningkatnya perekonomian sejak penurunan wabah covid-19 yang terjadi pada tahun 2021 dengan menunjukkan tren penurunan penerima PKH sebesar 32.468 jiwa pada tahun 2021 dan 31.597 jiwa pada tahun 2022. Namun dari data penerima PKH masih terdapat yang menerima bantuan

tersebut pada 2021 dan mendapatkan kembali pada 2022 sebanyak 1.781 jiwa.

Tabel 4.4 Penerima Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pemadanan

KECAMATAN	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	2.053	1
Benda	2.318	2
Cibodas	2.418	1
Ciledug	2.200	0
Cipondoh	2.866	0
Jatiuwung	1.836	1
Karang Tengah	1.470	1
Karawaci	3.403	1
Larangan	1.381	0
Neglasari	4.243	5
Periuk	2.013	1
Pinang	3.049	2
Tangerang	2.329	2
Tidak Terdata	1	1
TOTAL	31.580	17

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.4 Presentase Penerima Keluarga Harapan (PKH) Menurut Kecamatan
 Dari Total DTKS Kota Tangerang tahun 2022 yaitu sebanyak 879.781

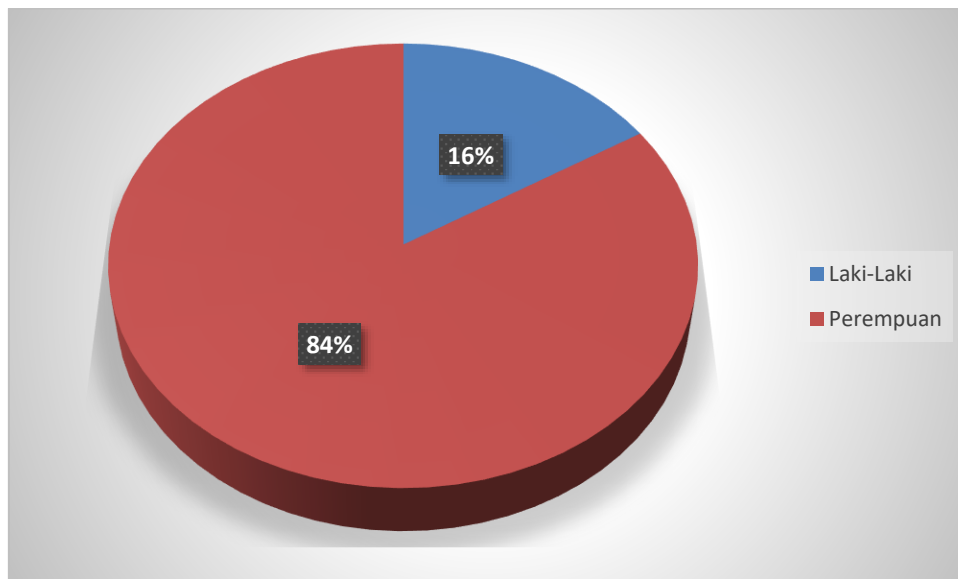
jiwa, terdapat 31.597 jiwa yang berhak mendapatkan PKH, Kecamatan Neglasari memiliki data PKH terbesar yaitu 4.248 jiwa sedangkan yang terkecil pada Kecamatan Larangan sebesar 1.381 jiwa dan yang tidak terdata sebesar 1 jiwa.

Tabel 4.5 Jumlah Penerima PKH Menurut Jenis Kelamin dan Berdasarkan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	0	0
5-9 Tahun	0	0
10-14 Tahun	1	3
15-19 Tahun	12	11
20-24 Tahun	21	37
25-29 Tahun	25	418
30-34 Tahun	47	1.597
35-39 Tahun	96	3.928
40-44 Tahun	126	5.460
45-49 Tahun	123	4.821
50-54 Tahun	80	2.518
55-59 Tahun	83	1.151
60-64 Tahun	1.897	2.570
65-69 Tahun	1.397	1.840
70-74 tahun	699	1.149

>75 Tahun	486	1.001
TOTAL	5.093	26.504

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.5 Penerima PKH Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan Penerima PKH menurut jenis kelamin perempuan mendominasi sebesar 84% sedangkan Laki-Laki hanya sebesar 16 %. Selain itu berdasarkan kelompok umur 40-44 Tahun terbesar sebesar 5.586 jiwa. (Menurut Esti Wijayati yang dikutip oleh www.krjogja.com) graduasi (berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH) ini memang dikhususkan bagi penerima manfaat yang masuk usia produktif. Harapannya, tidak terjadi ketergantungan penerima manfaat terhadap PKH. Karena itu, upaya pemberdayaan dilakukan, seperti peningkatan kesejahteraan dengan diberikan pembinaan dan permodalan usaha. Jika kemudian terjadi peningkatan kesejahteraan, maka penerima manfaat sudah mandiri dan tidak perlu lagi mendapat PKH.

4.3 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN)

PBI JK adalah peserta jaminan kesehatan yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran BPJS Kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah.

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI adalah salah satu program bansos yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan basis data dari DTKS.

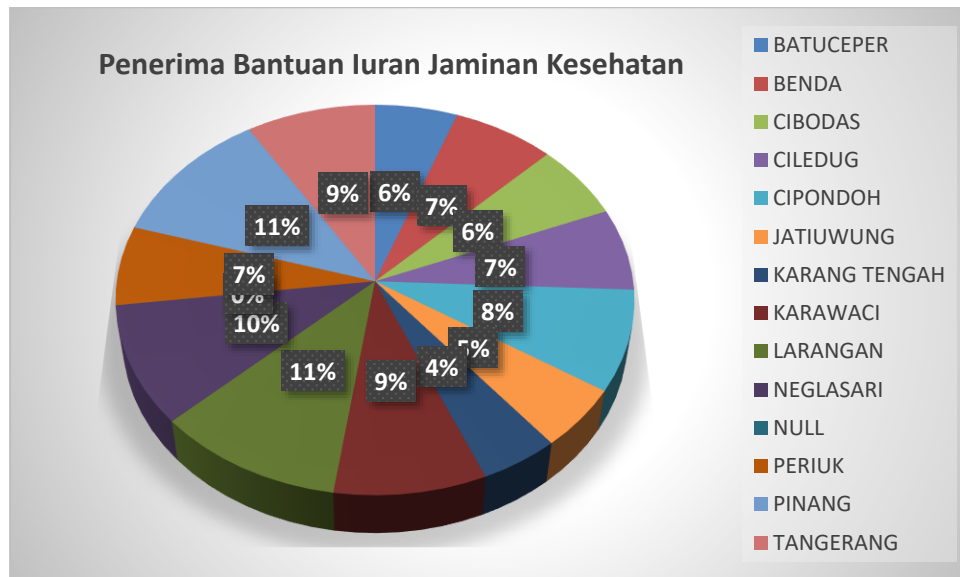
Program PBI-JK Kemensos didasarkan pada tiga regulasi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Mensos (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 tahun Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Proses pencairan bansos PBI JK dilakukan oleh Kemensos kepada peserta program BPJS Kesehatan dalam bentuk jaminan kesehatan.

Tabel 4.6 Penerima Bantuan Iuran JKN

KECAMATAN	PKH	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	19.134	18.726	408
Benda	23.704	22.937	767
Cibodas	21.224	20.433	791
Ciledug	23.072	22.430	642
Cipondoh	28.348	27.566	782
Jatiuwung	17.149	16.717	432
Karang Tengah	15.295	14.726	569
Karawaci	29.612	28.708	904
Larangan	36.689	36.062	627
Neglasari	33.501	31.965	1.536

Periuk	22.305	21.536	769
Pinang	39.097	37.863	1234
Tangerang	30.032	29.180	852
Tidak Terdata	49	48	1
TOTAL	339.211	328.897	10.314

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.6 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) Menurut Jenis Kelamin

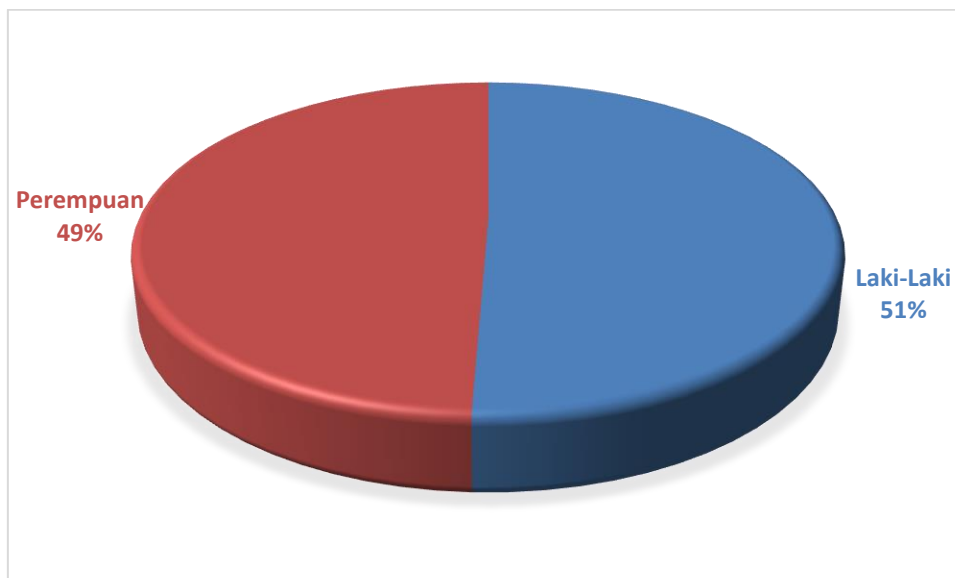
Terdapat 339.211 jiwa yang berhak mendapatkan Program PBI JKN dari total data DTKS sebanyak 879.781 jiwa, terlihat pada tabel 4.6 Kecamatan Pinang terdaftar pada PBI JKN terbesar yaitu 39.097 jiwa. sedangkan yang terkecil pada Kecamatan Karang Tengah sebesar 15.295 jiwa dan yang tidak terdata sebesar 49 jiwa.

Tabel 4.7 Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) Menurut Jenis Kelamin dan Berdasarkan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	9.615	8.960
5-9 Tahun	10.542	9.891
10-14 Tahun	15.113	14.061
15-19 Tahun	16.923	15.914
20-24 Tahun	16.621	15.026
25-29 Tahun	15.379	12.719

30-34 Tahun	13.019	10.677
35-39 Tahun	12.915	12.370
40-44 Tahun	12.903	14.212
45-49 Tahun	13.348	14.959
50-54 Tahun	11.984	12.715
55-59 Tahun	8.945	9.679
60-64 Tahun	6.589	7.154
65-69 Tahun	4.092	4.091
70-74 tahun	2.013	2.227
>75 Tahun	1.733	2.822
TOTAL	171.734	167.477

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.7 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan Penerima PBI JKN menurut jenis kelamin mendekati seimbang dengan presentase Jenis Kelamin Laki-Laki sebesar 51% sedangkan Jenis Kelamin perempuan sebesar 49 %. Selain itu berdasarkan kelompok umur 20-24 Tahun terbesar sebesar 31.647 jiwa. Dikutip dari unair.ac.id Analisis pada karakteristik usia menunjukkan bahwa hambatan untuk menjadi anggota JKN dihadapi oleh usia muda, yaitu 18-64 tahun. Kelompok usia muda cenderung memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik

dibandingkan kelompok usia lanjut. Hal ini melatarbelakangi kurangnya kesadaran mereka untuk bergabung dalam asuransi kesehatan. Kondisi keuangan yang belum stabil dan tingginya kebutuhan hidup juga menjadi faktor penghambat investasi kesehatan di kalangan pemuda.

4.4 Penerima Yang Mendapatkan Bantuan Satu Sampai Lebih Dari Satu Bantuan

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun dari data tersebut belum tentu berhak mendapatkan bantuan jika sosial ekonominya sudah tidak layak untuk mendapatkannya.

Namun penerima bantuan dapat mendapatkan lebih dari 1 bantuan jika memenuhi syarat/kriteria sesuai dengan **UU No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Sedangkan pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki **14 Kriteria Kemiskinan** yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai seseorang itu miskin atau tidak. Dari 14 kriteria kemiskinan ini, dapat dikatakan miskin dan layak menerima bansos apabila terpenuhi minimal 9 kriteria.

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Tabel 4.8 Penerima BPNT Berdasarkan Pemadanan

KECAMATAN	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	912	1
Benda	799	1
Cibodas	855	3
Ciledug	1.142	1

Cipondoh	1.408	0
Jatiuwung	1.136	1
Karang Tengah	978	1
Karawaci	1.812	2
Larangan	618	0
Neglasari	1.514	4
Periuk	1.208	2
Pinang	1.114	0
Tangerang	1.520	1
Tidak Terdata	2	
TOTAL	15.018	17

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Pada tabel 4.2 terdapat 54.907 jiwa yang berhak mendapatkan BPNT namun data tersebut tidak hanya menerima BPNT. Sementara terdapat masyarakat hanya menerima BPNT sebanyak 15.035 Jiwa dengan Kecamatan Karawaci terbesar yang terdaftar pada DTKS penerima BPNT sebesar 1.814 jiwa dan terkecil pada Kecamatan Larangan sebesar 618 jiwa dan yang tidak terdata sebesar 2 jiwa.

Tabel 4.9 Penerima BPNT Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	0	0
5-9 Tahun	0	0
10-14 Tahun	0	0
15-19 Tahun	27	24
20-24 Tahun	72	143
25-29 Tahun	411	528
30-34 Tahun	576	591
35-39 Tahun	467	606
40-44 Tahun	176	708
45-49 Tahun	139	927
50-54 Tahun	119	897
55-59 Tahun	95	782
60-64 Tahun	2.072	1.596

65-69 Tahun	1.370	989
70-74 tahun	540	454
>75 Tahun	311	415
TOTAL	6.375	8.660

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.8 Penerima BPNT Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan Penerima BPNT menurut umur terbanyak pada umur 60-64 tahun sebesar 3.668 Jiwa, Kelompok lansia yang dulu ketika masa produktifnya bekerja di sektor informal perlu mendapatkan perhatian khusus karena mereka tidak memiliki atau mendapatkan jaminan pensiun. Hal inilah yang dapat dijadikan pijakan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia di Kota Tangerang.

Tabel 4.10 Penerima PKH Berdasarkan Peadanan

KECAMATAN	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	553	0
Benda	502	0
Cibodas	754	0
Ciledug	860	0
Cipondoh	760	0
Jatiuwung	137	0

Karang Tengah	117	0
Karawaci	573	0
Larangan	35	0
Neglasari	375	1
Periuk	216	0
Pinang	227	0
Tangerang	145	0
Tidak Terdata	0	0
TOTAL	5.254	1

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

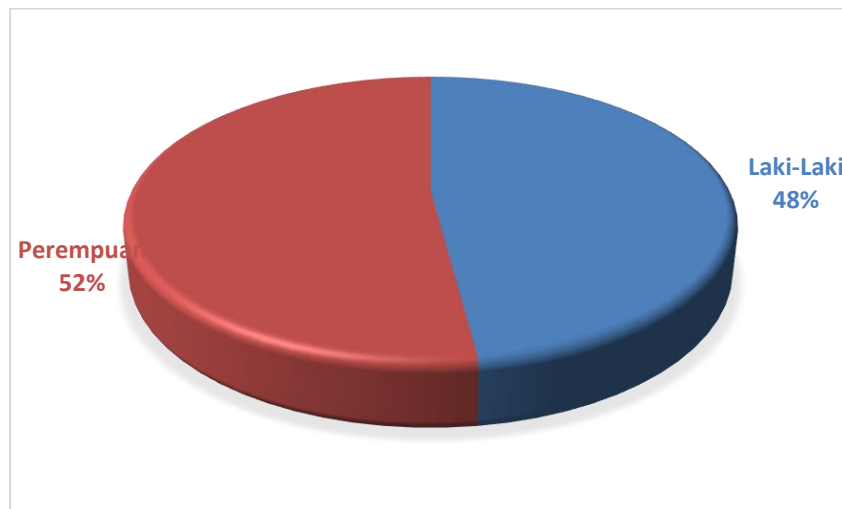
Total Data DTKS Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 879.781 jiwa, terdapat 31.597 jiwa yang berhak mendapatkan PKH. Namun yang hanya menerima PKH sebanyak 5.255 Jiwa dengan Penerima PKH terbanyak pada Kecamatan Ciledug sebesar 860 jiwa sedangkan yang terkecil pada Kecamatan Larangan sebesar 35 jiwa.

**Tabel 4.11 Penerima PKH
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	0	0
5-9 Tahun	0	0
10-14 Tahun	0	0
15-19 Tahun	5	6
20-24 Tahun	8	11
25-29 Tahun	9	72
30-34 Tahun	15	219
35-39 Tahun	25	430
40-44 Tahun	30	488
45-49 Tahun	15	338
50-54 Tahun	12	154
55-59 Tahun	25	75
60-64 Tahun	1.113	460
65-69 Tahun	784	271
70-74 tahun	327	125
>75 Tahun	151	87

TOTAL	2.519	2.736
--------------	--------------	--------------

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.9 Penerima PKH Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan Penerima PKH menurut umur terbanyak pada umur 60-64 tahun sebesar 1.573 Jiwa, Program perlindungan lansia diyakini dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia tetapi juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan lansia secara umum.

Sedangkan presentase penerima PKH menurut jenis kelamin perempuan lebih besar dengan presentase 52% sedangkan Laki-Laki dengan presentase sebesar 48 %. Hal ini dikarenakan dampak covid-19 lebih banyak dirasakan oleh perempuan yang diberikan keluarganya untuk bisa membiayai sekolah anak, untuk bisa melakukan imunisasi dan membantu ibu hamil.

Tabel 4.12 Penerima PBI JKN Berdasarkan Pemadanan

KECAMATAN	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	16.341	406
Benda	20.155	760
Cibodas	18.173	790

Ciledug	19.882	642
Cipondoh	24.228	780
Jatiuwung	14.385	431
Karang Tengah	12.927	568
Karawaci	24.994	903
Larangan	33.229	626
Neglasari	26.863	1.528
Periuk	19.182	768
Pinang	34.077	1.232
Tangerang	25.865	849
Tidak Terdata	45	1
TOTAL	290.346	10.284

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

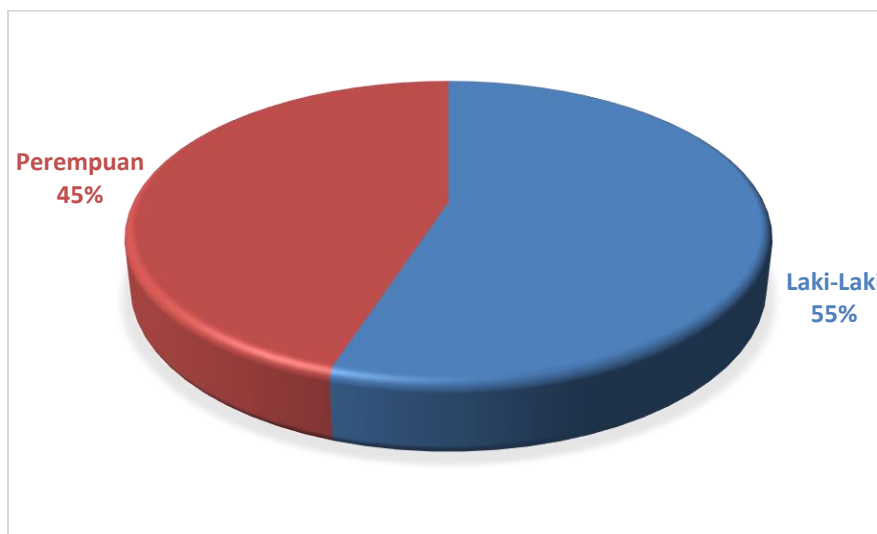
Total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 879.781 jiwa, terdapat 339.211 jiwa yang berhak mendapatkan PBI JKN. Namun yang hanya menerima PBI JKN sebanyak 300.630 Jiwa dengan PBI JKN terbanyak pada Kecamatan Pinang sebesar 35.309 jiwa sedangkan yang terkecil pada Kecamatan Karang Tengah sebesar 13.495 jiwa dan yang tidak terdata sebesar 69 jiwa.

**Tabel 4.13 Penerima PBI JKN
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	9.615	8.960
5-9 Tahun	10.542	9.891
10-14 Tahun	15.112	14.058
15-19 Tahun	16.895	15.884
20-24 Tahun	16.514	14.800
25-29 Tahun	15.048	12.016
30-34 Tahun	12.561	9.211
35-39 Tahun	12.534	9.168
40-44 Tahun	12.705	9.246
45-49 Tahun	13.163	9.311

50-54 Tahun	11.772	8.051
55-59 Tahun	8.719	6.330
60-64 Tahun	4.805	3.645
65-69 Tahun	2.769	1.931
70-74 tahun	1.351	1.079
>75 Tahun	1.236	1.708
TOTAL	165.341	135.289

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.10 Penerima PBI JKN Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) menurut jenis kelamin mendekati seimbang dengan presentase Jenis Kelamin Laki-Laki sebesar 55% sedangkan Jenis Kelamin perempuan sebesar 45 %. Selain itu berdasarkan kelompok umur 15-19 Tahun terbesar sebesar 32.779 jiwa.

Diharapkan kepesertaan JKN mampu memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain terdapat peningkatan jumlah masyarakat miskin yang tercakup dalam program JKN, masyarakat miskin juga memiliki peningkatan probabilitas akses ke fasilitas kesehatan dan pengurangan OOP saat mengakses fasilitas kesehatan.

Tabel 4.14 Penerima BPNT dan PKH Berdasarkan Pemasangan

KECAMATAN	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	324	0
Benda	333	0
Cibodas	403	0
Ciledug	249	0
Cipondoh	460	0
Jatiuwung	535	0
Karang Tengah	507	0
Karawaci	898	0
Larangan	227	0
Neglasari	922	0
Periuk	569	0
Pinang	745	0
Tangerang	600	0
Tidak Terdata	1	0
TOTAL	6.773	0

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Total Data DTKS Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 879.781 jiwa. Namun dari DTKS terdapat penerima yang mendapatkan lebih dari satu bantuan yaitu BPNT dan PKH sebanyak 6.773 Jiwa dengan penerima terbanyak pada kecamatan Neglasari sebesar 922 jiwa sedangkan yang terkecil pada kecamatan Larangan sebesar 2 jiwa dan yang tidak terdata sebesar 1 jiwa.

**Tabel 4.15 Penerima BPNT dan PKH
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	0	0
5-9 Tahun	0	0
10-14 Tahun	0	0
15-19 Tahun	1	0
20-24 Tahun	1	5
25-29 Tahun	4	101
30-34 Tahun	8	404
35-39 Tahun	22	954
40-44 Tahun	25	1.173
45-49 Tahun	26	902
50-54 Tahun	16	351
55-59 Tahun	4	150
60-64 Tahun	188	768
65-69 Tahun	190	619
70-74 tahun	110	361
>75 Tahun	91	299
TOTAL	686	6.087

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.11 Penerima BPNT dan PKH Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan Penerima BPNT dan PKH menurut umur terbanyak pada umur 40-44 tahun sebesar 1.198 Jiwa dan menurut jenis kelamin perempuan jauh lebih besar dengan presentase 90% sedangkan Laki-Laki dengan presentase sebesar 10%, dikutip dari CNN Indonesia Menteri Keuangan Sri

Mulyani menyatakan sebagian besar bantuan, termasuk bantuan sosial (bansos), di masa pandemi covid-19 diberikan untuk perempuan. Hal ini dikarenakan dampak covid-19 lebih banyak dirasakan oleh perempuan.

"Perempuan jelas menanggung beban lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan bantuan melalui berbagai instrumen APBN fiskal di desain untuk diberikan benefit lebih banyak ke perempuan.

Tabel 4.16 Penerima BPNT dan PBI JKN Berdasarkan Pemadanan

KECAMATAN	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	1.209	1
Benda	1.299	5
Cibodas	999	0
Ciledug	1.457	0
Cipondoh	1.692	2
Jatiuwung	1.168	0
Karang Tengah	953	0
Karawaci	1.782	0
Larangan	1.714	1
Neglasari	2.156	4
Periuk	1.126	0
Pinang	1.709	0
Tangerang	1.731	1
Tidak Terdata	3	0
TOTAL	18.998	14

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

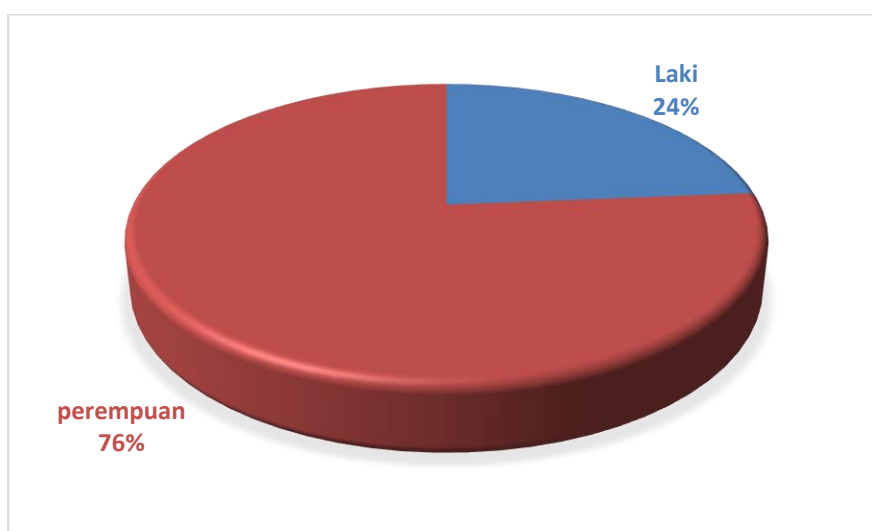
Total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 879.781 jiwa. Namun dari total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat penerima yang mendapatkan lebih dari satu bantuan yaitu BPNT dan PBI JKN sebanyak 19.012 Jiwa dengan penerima terbanyak pada kecamatan Karawaci sebesar 1.702 jiwa sedangkan

yang terkecil pada kecamatan Karang Tengah sebesar 953 jiwa dan yang tidak terdata sebesar 1 jiwa.

**Tabel 4.17 Penerima BPNT dan PBI JKN
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	0	0
5-9 Tahun	0	0
10-14 Tahun	0	0
15-19 Tahun	22	25
20-24 Tahun	95	205
25-29 Tahun	320	458
30-34 Tahun	434	493
35-39 Tahun	332	658
40-44 Tahun	127	1167
45-49 Tahun	103	2068
50-54 Tahun	160	2651
55-59 Tahun	172	2423
60-64 Tahun	1188	2167
65-69 Tahun	900	1210
70-74 tahun	401	493
>75 Tahun	251	489
TOTAL	4505	14507

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.12 Penerima BPNT dan PBI JKN Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan Penerima BPNT dan PBI JKN menurut umur terbanyak pada umur 60-64 tahun sebesar 3.355 Jiwa dan menurut jenis kelamin perempuan jauh lebih besar dengan presentase 76% sedangkan Laki-Laki dengan presentase sebesar 24%.

**Tabel 4.18 Penerima PKH dan PBI JKN
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

KECAMATAN	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	378	0
Benda	551	2
Cibodas	382	0
Ciledug	460	0
Cipondoh	567	0
Jatiuwung	240	0
Karang Tengah	182	1
Karawaci	488	0
Larangan	192	0
Neglasari	704	1
Periuk	422	1
Pinang	525	0
Tangerang	385	1
Tidak Terdata	0	0
TOTAL	5.476	6

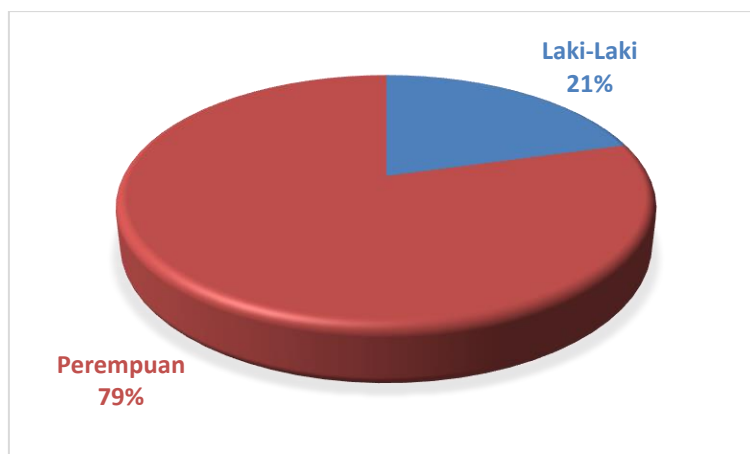
SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Total data DTKS Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 879.781 jiwa. Namun dari total Data DTKS terdapat penerima yang mendapatkan lebih dari satu bantuan yaitu PKH dan PBI JKN sebanyak 5.482 Jiwa dengan penerima terbanyak pada Kecamatan Neglasari sebesar 705 jiwa sedangkan yang terkecil pada Kecamatan Larangan sebesar 192.

**Tabel 4.19 Penerima PKH dan PBI JKN
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	0	0
5-9 Tahun	0	0
10-14 Tahun	1	3
15-19 Tahun	6	5
20-24 Tahun	10	17
25-29 Tahun	11	92
30-34 Tahun	20	310
35-39 Tahun	33	716
40-44 Tahun	32	895
45-49 Tahun	49	865
50-54 Tahun	32	498
55-59 Tahun	29	227
60-64 Tahun	407	298
65-69 Tahun	273	194
70-74 tahun	137	126
>75 Tahun	93	103
TOTAL	1.133	4.349

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.13 Penerima PKH dan PBI JKN Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan Penerima PKH dan PBI JKN menurut umur terbanyak pada umur 40-44 tahun sebesar 927 Jiwa dan menurut jenis kelamin perempuan jauh lebih besar dengan presentase 79% sedangkan Laki-Laki dengan presentase sebesar 21%.

**Tabel 4.20 Penerima BPNT, PKH dan PBI JKN
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

KECAMATAN	Padan	Tidak Padan
Batu Ceper	798	1
Benda	932	0
Cibodas	879	1
Ciledug	631	0
Cipondoh	1.079	0
Jatiuwung	924	1
Karang Tengah	664	0
Karawaci	1.444	1
Larangan	927	0
Neglasari	2.242	3
Periuk	806	0
Pinang	1.552	2
Tangerang	1.199	1
Tidak Terdata	0	0
TOTAL	14.077	10

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022

Total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 879.781 jiwa. Namun dari total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat penerima yang mendapatkan semua bantuan yaitu penerima BPNT, PKH dan PBI JKN sebesar 14.087 Jiwa dengan penerima terbanyak pada Kecamatan Neglasari sebesar 2.245 jiwa sedangkan yang terkecil pada Kecamatan Ciledug sebesar 631.

**Tabel 4.21 Penerima BPNT, PKH dan PBI JKN
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
0-4 Tahun	0	0
5-9 Tahun	0	0
10-14 Tahun	0	0
15-19 Tahun	0	0
20-24 Tahun	2	4
25-29 Tahun	1	153
30-34 Tahun	4	664
35-39 Tahun	16	1.828
40-44 Tahun	39	2.904
45-49 Tahun	34	2.716
50-54 Tahun	20	1.515
55-59 Tahun	25	699
60-64 Tahun	189	1.044
65-69 Tahun	150	756
70-74 tahun	125	537
>75 Tahun	150	512
TOTAL	755	13.332

SUMBER: Kemensos No.46/HUK/2022



Grafik 4.14 Penerima PKH dan PBI JKN Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan penerima PKH dan PBI JKN menurut umur terbanyak pada umur 40-44 tahun sebesar 2.943 Jiwa dan menurut jenis kelamin perempuan jauh lebih besar dengan presentase 95% sedangkan Laki-Laki dengan presentase sebesar 5 %.

BAB 4

KESIMPULAN

4.5 Kesimpulan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum dari hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tangerang tahun 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 879.781 Jiwa dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 191.547 Jiwa. Peningkatan tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan data DTKS menjadi big data meningkatkan data warga miskin dan lebih banyak, yakni 60% sejalan dengan dampak pandemi yang meningkatkan jumlah orang miskin.

Sementara Total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tangerang tahun 2022 sebanyak 879.781 Jiwa, yang terbagi kategori menurut Laki-Laki sebanyak 446.185 Jiwa dan menurut Perempuan sebanyak 433.596 Jiwa, dengan Kecamatan tertinggi yang terdaftar pada DTKS yaitu Kecamatan Karawaci sebanyak 90.701 Jiwa terbagi menurut Laki - Laki 46.171 Jiwa dan Perempuan sebanyak 44.530 Jiwa

Sedangkan menurut kelompok umur yang terbesar pada kelompok umur 10 -14 tahun sebesar 77.066 Jiwa terdiri dari laki-laki 39.947 jiwa dan perempuan 37.119 jiwa dan 20-24 tahun sebesar 76.007 jiwa terdiri dari laki-laki 38.972 jiwa dan perempuan 37.035 jiwa.

Data DTKS menurut pekerjaan tahun 2022 terdiri dari 73 jenis pekerjaan, Karyawan swasta dan Ibu Rumah Tangga merupakan status pekerjaan tertinggi yang terdaftar di data DTKS sebesar 209.713 jiwa dan 209.629 jiwa.

Data DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya Program BPNT, Program PKH dan Program PBI JKN, namun dari 879.781 Jiwa yang terdaftar pada data DTKS tidak semua mendapatkan program bantuan sosial hanya 54.907 jiwa yang berhak mendapatkan BPNT, 31.597 jiwa yang berhak mendapatkan Program PKH dan 339.211 jiwa yang berhak mendapatkan Program PBI JKN.

Tidak sedikit penerima program bantuan sosial tersebut mendapatkan lebih dari 1 bantuan jika memenuhi syarat/kriteria sesuai dengan **UU No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan BPS** (Badan Pusat Statistik) dengan memiliki **14 Kriteria Kemiskinan**.

Sehingga perlu dilakukan perincian data penerima bantuan sosial yang mendapatkan hanya 1 bantuan sampai 3 bantuan sekaligus diantaranya hanya BPNT sebanyak 15.035 Jiwa, PKH sebanyak 5.255 Jiwa, PBI JKN sebanyak 300.630 Jiwa, BPNT dan PKH sebanyak 6.773 Jiwa, BPNT dan PBI JKN sebanyak 19.012 Jiwa, PKH dan PBI JKN sebanyak 5.482 Jiwa dengan penerima terbanyak pada kecamatan Neglasari sebesar 705 jiwa sedangkan

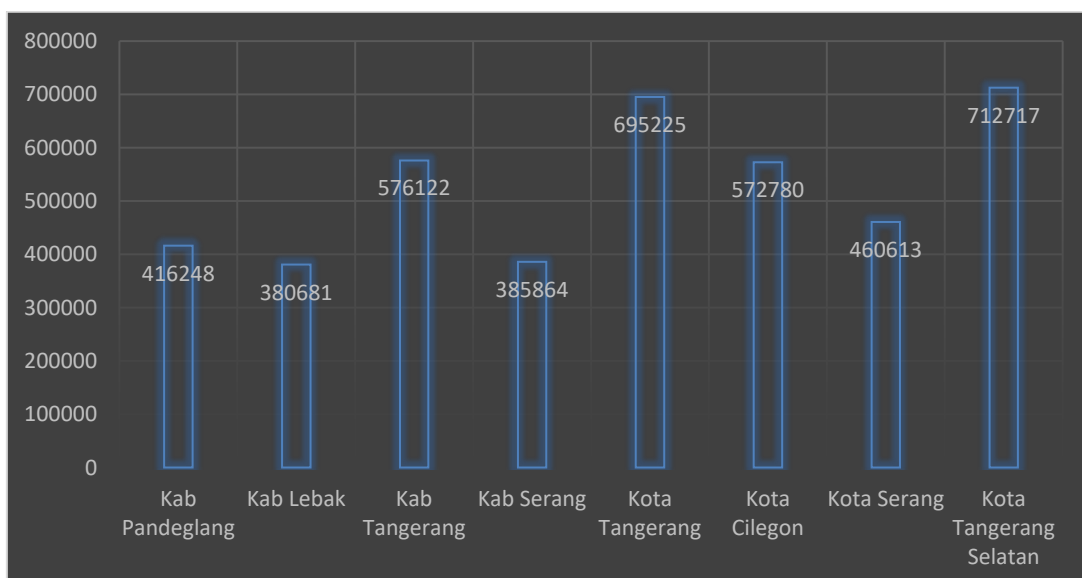
yang terkecil pada kecamatan Larangan sebesar 192 jiwa dan menerima semua jenis bantuan diantaranya BPNT, PKH dan PBI JKN dengan jumlah penerima sebesar 14.087 Jiwa.

BAB 5

Lampiran

5.1 Garis Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli makanan yang mengandung 2100 kkal perhari dan keperluan mendasar bukan makanan, dalam satu bulan. Penduduk dengan pengeluaran perkapita sebulan dibawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin, secara fisik sering ditandai dengan menderita kekurangan gizi dan tingkat kesehatan yang buruk dan berpendidikan rendah. Ciri orang miskin lainnya adalah biasanya bekerja dengan memperoleh penghasilan yang minim, bekerja di sektor informal maupun buruh serabutan, dengan penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok satu hari saja.



Grafik 5.1 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Banten

Tahun 2022

Terlihat pada gambar, bahwa nilai garis kemiskinan dengan urutan pertama yaitu di Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.712.717, Kota Tangerang menduduki urutan kedua sebesar Rp. 695.225, urutan ketiga yaitu Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 576.122, disusul Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan urutan terakhir yaitu Kabupaten Lebak.

**Tabel 5.1 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Banten
Tahun 2017 – 2022**

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab Pandeglang	285.822	310.859	326.517	361.713	390.754	416.248
2	Kab Lebak	261.880	283.901	298.201	334.509	358.479	380.681
3	Kab Tangerang	423.486	451.325	476.636	520.742	545.065	576.122
4	Kab Serang	269.652	294.829	309.036	341.074	362.102	385.864
5	Kota Tangerang	508.551	556.782	584.318	632.835	655.061	695.225
6	Kota Cilegon	373.147	428.867	459.469	504.571	540.032	572.780
7	Kota Serang	296.819	350.237	379.641	411.595	431.210	460.613
8	Kota Tangerang Selatan	494.784	549.150	593.781	643.083	665.610	712.717
Provinsi Banten		386.753	431.069	462.726	508.091	530.363	570.368

Sumber: BPS Kota Tangerang

Tabel 6.1 memperlihatkan garis kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Dimana pada tahun 2022 garis kemiskinan (GK) Kota Tangerang sebesar Rp 695.225 sedangkan Banten tercatat Rp 570.368, Memaknai garis kemiskinan sebesar Rp 695.225 perbulan yakni apabila suatu

rumah tangga dengan anggota rumah tangga 2 orang anak, ayah, ibu dan mertua yang tinggal di rumah tersebut pengeluaran rumah tangga setiap bulannya kurang atau dibawah $5 \times \text{Rp } 695.225 = \text{Rp } 3.476.125$ maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin, berbeda apabila dirumah tangga tersebut hanya terdiri dari 1 orang anak dan 1 orang ibu akan dikatakan miskin apabila pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp 1.168.636. Dengan kata lain batas pengeluaran rumah tangga miskin akan bervariasi tergantung pada jumlah anggota rumah tangganya.

Pada tahun 2017, garis kemiskinan di Kota Tangerang sebesar Rp. 508.551 perkapita perbulan, memaknai bahwa seorang penduduk di Kota Tangerang membutuhkan Rp. 508.551 perbulan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan pada tahun 2022 nilai garis kemiskinan telah mencapai Rp. 695.225 per kapita per bulan, sehingga selama kurun waktu 2017 hingga 2021 terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar Rp. 186.674.

Garis Kemiskinan (GK) Kota Tangerang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan bervariasi selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, baik secara persentase maupun secara jumlah. Secara persentase, kenaikan tersebut berturut-turut besarnya adalah 2.46 persen, 9.48 persen, 4.95 persen, 8.30 persen, 3.51 persen dan 6,13 persen. Sedangkan secara jumlah, besarnya kenaikan tersebut secara berturut-turut adalah 12.2 persen, 48.2 persen, 27.5 persen, 48.5 persen, 22.2 persen dan 40,1 persen. Meningkatnya garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, adanya perubahan selera atau gaya hidup, yang mengubah pola konsumsi rumah tangga juga masyarakat Kota Tangerang.

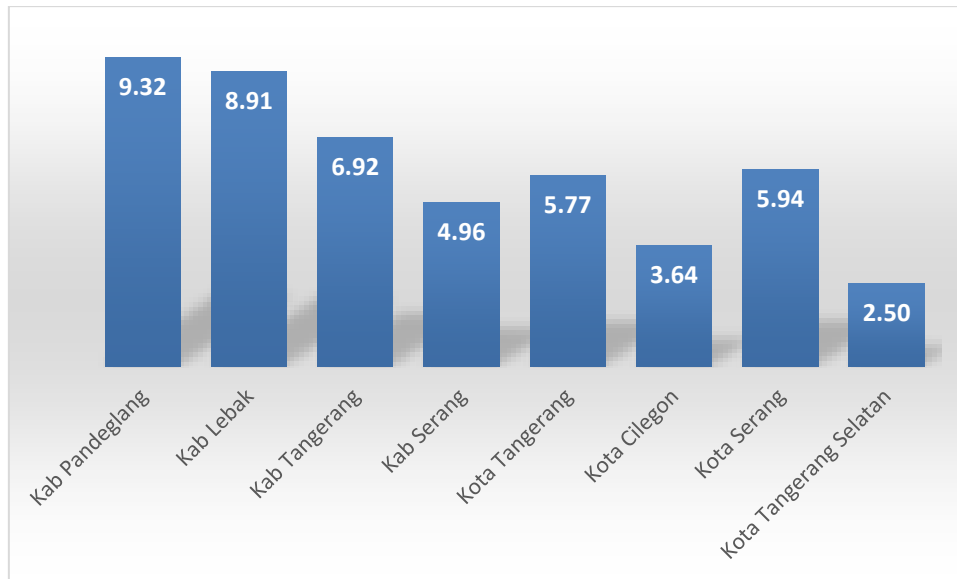
5.2 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin

Jumlah dan persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di Provinsi Banten dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada Kota Tangerang di tahun 2019 memiliki jumlah penduduk 98,37 ribu jiwa, tahun 2020 sebesar 118,22 ribu jiwa, tahun 2021 sebesar 134,24 ribu jiwa, tahun 2022 sebesar 134,24 ribu jiwa dan memiliki persentase penduduk miskin pada tahun tahun 2019 sebesar 4.43 persen, tahun 2020 sebesar 5.22 persen, tahun 2021 sebesar 5.93 persen dan tahun 2022 5,77 persen.

Tabel 5.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang

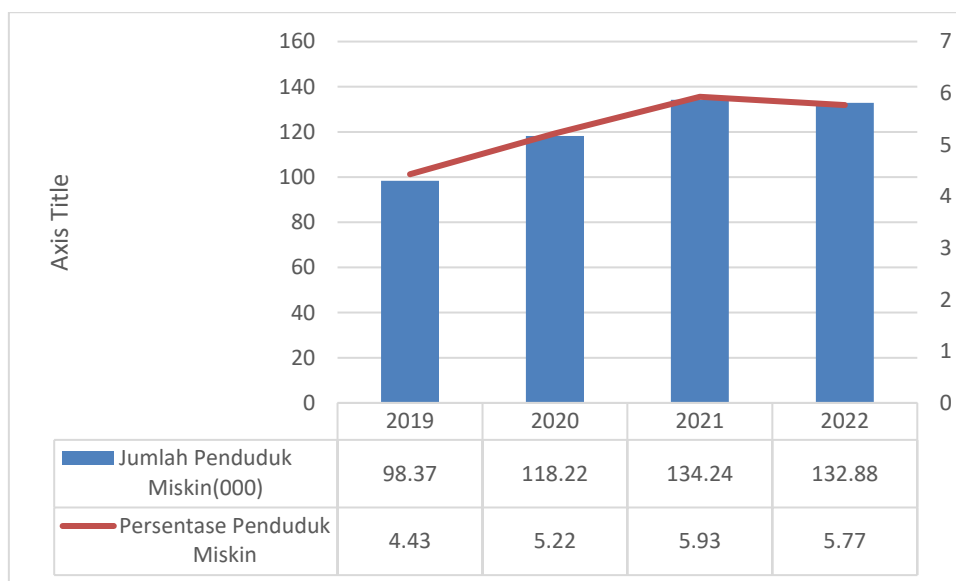
Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin(000)				Persentase Penduduk Miskin			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	114,09	120,44	131,43	114,65	9,42	9,92	10,72	9,32
Kab Lebak	107,93	120,83	134,75	117,22	8,30	9,24	10,29	8,91
Kab Tangerang	193,97	242,16	272,35	270,52	5,14	6,23	7,12	6,92
Kab Serang	61,54	74,80	83,09	75,45	4,08	4,94	5,49	4,96
Kota Tangerang	98,37	118,22	134,24	132,88	4,43	5,22	5,93	5,77
Kota Cilegon	13,20	16,31	18,89	16,46	3,03	3,69	4,24	3,64
Kota Serang	36,21	42,24	47,91	42,56	5,28	6,06	6,79	5,94
Kota Tangerang Selatan	29,16	40,99	44,57	44,29	1,68	2,29	2,57	2,50
Provinsi Banten	654,46	775,99	867,23	814,02	5,09	5,92	6,66	6,16

Sumber : BPS Kota Tangerang



Grafik 5,2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Banten Tahun 2022

Terlihat pada gambar bahwa persentase penduduk miskin di urutan pertama yaitu Kota Tangsel dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,50 persen, Kota Cilegon pada urutan ke 2 dengan persentase sebesar 3,64 persen, Kabupaten Serang pada urutan ke 3 dengan persentase 4,96 persen dan urutan ke 4 Kota Tangerang dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5,77 persen, Disusul berturut-turut Kota Serang, Kab Tangerang, Kabupaten Lebak dan urutan terakhir Kabupaten Pandeglang dengan jumlah persentase penduduk miskin sebesar 9,32 persen,



Grafik 5,3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2019 s/d 2022

Grafik 6,3 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dimana selalu terjadi kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin sampai tahun 2021, namun terjadi perbaikan pada tahun 2022 yang mengalami penurunan,

Namun penurunan pada tahun 2022 belum bisa menyamai persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang pada tahun 2019, sehingga Pemerintah harus semakin serius dan fokus dalam pengentasan kemiskinan, Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, biasanya hanya dengan sedikit guncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin terlebih kalau kita cermati lebih jauh tidak sedikit penduduk miskin yang bekerja di sektor informal sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar dari kemiskinan tetap juga tidak sedikit yang masuk menjadi miskin, Sebaiknya program - program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk masyarakat

yang berada dibawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan, Pengentasan kemiskinan akan lebih efektif apabila kemiskinan makro dan mikro disandingkan, intervensi pada kelompok sasaran yaitu kelompok 40 persen terbawah,

5.3 Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

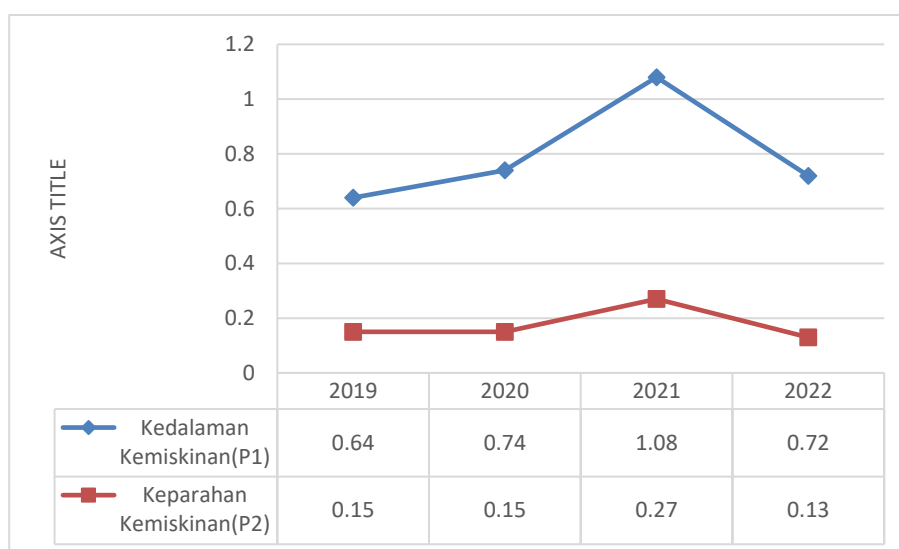
Mengukur kemiskinan tidak cukup hanya melihat penambahan dan pengurangan jumlah penduduk miskin, Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, Karenanya dalam upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan,

Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin (GK), Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Sedangkan untuk melihat variasi pengeluaran diantara penduduk miskin yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan di antara penduduk miskin dapat dilihat dari **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**, Semakin tinggi nilai Indeks ini maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin, sebaiknya apabila ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu adalah nol atau tidak ada ketimpangan,

Tabel 5,3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Banten 2019-2022

No	Kabupaten/Kota	Kedalaman Kemiskinan(P1)				Keparahan Kemiskinan(P2)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022

1	Kab Pandeglang	1,33	1,00	1,49	1,21	0,28	0,16	0,33	0,33
2	Kab Lebak	0,97	1,14	1,66	1,35	0,21	0,24	0,40	0,33
3	Kab Tangerang	0,69	0,95	1,21	1,06	0,14	0,22	0,29	0,26
4	Kab Serang	0,65	0,40	0,61	0,56	0,16	0,05	0,12	0,11
5	Kota Tangerang	0,64	0,74	1,08	0,72	0,15	0,15	0,27	0,13
6	Kota Cilegon	0,34	0,39	0,50	0,42	0,07	0,06	0,11	0,09
7	Kota Serang	0,51	0,59	0,92	0,77	0,11	0,10	0,22	0,17
8	Kota Tangerang Selatan	0,27	0,31	0,34	0,32	0,07	0,08	0,07	0,07
Provinsi Banten		0,76	1,00	1,09	1,03	0,18	0,23	0,26	0,27



Sumber : BPS Kota Tangerang

Grafik 5,4 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kota Tangerang 2019-2022

Tabel 6,3 dan Gambar memperlihatkan bahwa indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 0,64 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,74 kembali meningkat tahun 2021 mencapai angka sebesar 1,08 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,72, Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan selama periode 2021 sampai 2022 memaknai bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin pada periode tersebut semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga tingkat kesenjangan atau indeks keparahan kemiskinannya menjadi berkurang, Dengan demikian, kualitas

hidup penduduk miskin di Kota Tangerang selama setahun terakhir mengalami kenaikan,

Selanjutnya juga disajikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tangerang, Nilai indeks ini memberi gambaran ketimpangan/jarak pengeluaran antar penduduk miskin, Pada tahun 2019 pengeluaran diantara penduduk miskin bernilai indeks 0,15 setara pada tahun 2020 sebesar 0,15 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 0,27 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,13. Mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menyempit.

5.4 Gambaran Umum Perekonomian dan Distribusi Pendapatan

Kemiskinan masyarakat di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan perekonomian baik skala makro maupun mikro, Bagi suatu wilayah setingkat kabupaten/kota biasanya perkembangan ekonomi diukur dari naik turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahun, Semakin besar pertumbuhan PDRB-nya maka diasumsikan semakin baik pula perkembangan ekonominya, Perkembangan ekonomi yang semakin baik akan berdampak pada makin sejahteranya masyarakat, dengan catatan bahwa distribusi pendapatan tersebut terbagi merata,

Pada kondisi tertentu peningkatan PDRB tidak berkorelasi dengan penurunan atau kenaikan jumlah penduduk miskin, Sebenarnya masalah yang mendasar bukan bagaimana meningkatkan PDRB, tetapi lebih kepada siapa yang menumbuhkan/meningkatkan PDRB, apakah sebagian besar masyarakat atautkah hanya beberapa gelintir saja, Jika yang berperan menumbuhkan PDRB hanya pengusaha kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan itupun hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang

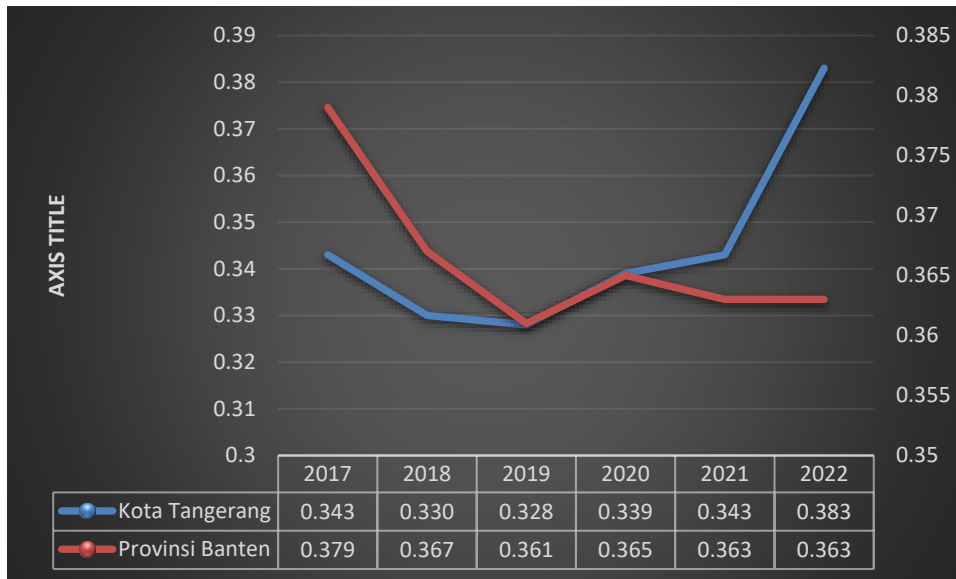
saja, sehingga kemiskinan maupun ketimpangan semakin parah, Lain halnya jika pertumbuhan itu dihasilkan oleh orang banyak, maka mereka pulalah yang memperoleh manfaat terbesarnya dan buah dari pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih merata,

Ada berbagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain *Kurva Conrad Lorenz*, *Corrado Gini Coefficient*, *Kuznets Index*, *Oshima Index* dan *Theil Decomposition Index*, Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah *Gini Coefficient* atau lebih dikenal dengan nama *Gini Ratio (GR)*, Angka *Gini Ratio* menurut H, T, Oshima:

1. ketimpangan rendah (*low*) bila GR kurang dari 0,3;
2. ketimpangan sedang (*moderate*) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4
3. Ketimpangan tinggi (*high*) bila GR lebih dari 0,4,

Angka *Gini Ratio* menurut Michael P, Todaro:

1. Distribusi pendapatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2 sampai 0,35
2. Relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan kurang dari 0,5
3. Timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7



Sumber: BPS Kota Tangerang

Grafik 5,5 Gini Ratio Kab/Kota Provinsi Banten 2017-2022

Dari Gambar diatas dapat di ketahui bahwa indeks gini rasio (GR) Kota Tangerang mengalami peningkatan yaitu dari 0,343 poin pada Tahun 2021 menjadi 0,383 poin pada Tahun 2022, Kondisi ini mencerminkan semakin memburuknya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang, Kondisi ini dipicu oleh terjadinya Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang melanda sejak Tahun 2020 yang belum pulih sampai dengan tahun 2022, Indeks gini Kota Tangerang Tahun 2022 tersebut juga mengandung arti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tangerang pada Tahun 2022 dikategorikan sebagai tingkat “ketimpangan sedang”, Menurut Michael P, Todaro bila GR antara 0,2 sampai 0,35 ketimpangannya masih dalam kategori rendah, Sedangkan Menurut H, T, Oshima ketimpangan sedang (*moderate*) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4,

Pada Tahun 2022, indeks gini rasio Kota Tangerang mencapai 0,383 poin lebih tinggi dari Provinsi Banten yang mencapai 0,363 poin, Kondisi ini

mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang lebih buruk dari Provinsi Banten.

Pola distribusi pendapatan yang didasarkan pada hasil penghitungan Gini Ratio barulah menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara garis besar, Apakah merata miskin atau merata menengah? Berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok penduduk berpendapatan rendah/miskin? Gini Ratio tidak dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut, Oleh karena itu, Gini Ratio perlu disandingkan dengan indikator lain yang telah dikembangkan oleh Bank Dunia dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (inequality), Indikator lain tersebut adalah yang disebut relative inequality, Relative inequality diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai kelas atau kelompok masyarakat, Relative inequality dan absolute poverty merupakan dua aspek kembar keadilan dalam proses pemerataan pembangunan atau pemerataan pendapatan nasional/daerah,

Ketidakmerataan pendapatan Menurut Montek S, Ahluwalia atau Bank Dunia *relative inequality* berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan dianggap parah apabila 40 persen penduduk berpenghasilan rendah menikmati kurang dari 12 persen Produk domestik,
2. Ketidakmerataan dianggap moderat apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati 12-17 persen Produk domestik,
3. Apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17 persen produk domestik maka ketimpangan atau kesenjangan dinyatakan lunak,

